

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN
DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh:

Shandy Pratama

1905046099

**S1 AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

PENGESAHAN

Nama : Shandy Pratama
NIM : 1905046099
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Semarang Selatan)”**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat **cumlaude/baik/cukup**, pada tanggal: **7 September 2023**

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 7 September 2023

Mengetahui,

Ketua Sidang

Warno, SE., M.Si.
NIP. 198307212015031002

Sekretaris Sidang

Dr. Ari Kristin Prastyoningrum, SE., M.Si.
NIP. 197905122005012004

Penguji Utama I

Mashilal, SEI., M.Si.
NIP. 198405162019031005

Penguji Utama II

Septiana Na'afi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198909242019032018

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin Prastyoningrum, SE., M.Si.
NIP. 197905122005012004

Pembimbing II

Dwi Swasana Ramadhan, SE., M.SEI.
NIP. 199403032019031014



PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Shandy Pratama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Shandy Pratama

NIM : 1905046099

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Semarang Selatan)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 27 Juli 2023

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si

NIP. 197905122005012004

Pembimbing II

Dwi Swasana Ramadhan, S.E., M.SEI

NIP. 199403032019031014

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*”

Q.S. Al-Insyirah/94:6

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tua saya tercinta Bapak Syahidin dan Ibu Isnawanty yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus, memberikan semangat, dukungan moril dan materil, serta selalu mendoakan kesuksesan anak-anaknya.
2. Adik saya, Yudha Wiryanto dan Dhiena Putri Syahid yang saya sayangi, terima kasih sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkah dan selalu mendoakan kesuksesan untuk penulis.
3. Untuk keluarga besar dari Kakek dan Nenek dari Bapak, Alm. Engkong Muhammad dan Almh. Nyai Saniyah yang terus memberikan penyemangat dan dukungan moril dan materil, serta mendoakan kesuksesan anak-anaknya.
4. Untuk keluarga besar dari Kakek dan Nenek dari Ibu, Mbah Suwanto dan Mbah Suwarni yang terus memberikan penyemangat dan dukungan moril dan materil, serta mendoakan kesuksesan anak-anaknya.
5. Untuk teman-teman Akuntansi Syariah 2019 khususnya AKS C yang telah menjadi keluarga dan sahabat, terima kasih atas kebersamaannya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2023

Deklarator



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shandy Pratama', written over a horizontal line.

Shandy Pratama
NIM. 1905046099

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah

Tasydid dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

E. Kata Sandang (..ال)

Katasandang (...ال) ditulis dengan *al...* misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta, Marbutoh

Setiap *ta marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطّبيعيّة المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berkontribusi cukup besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner yang menggunakan data primer. Populasi pada penelitian ini berjumlah 26.458 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan. Jumlah responden yang dijadikan sampel yaitu 100 responden yang diambil secara acak dengan metode sampling incidental. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan. Proses analisis dan olah data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Selatan.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

ABSTRACT

Tax is one of the sources of state revenue that contributes significantly to financing government administration and national development which is used for the prosperity of the people. This research aims to determine the influence of taxpayer awareness, service quality and a modern tax administration system on individual taxpayer compliance. The method used is a quantitative research method by distributing questionnaires using primary data. The population in this study amounted to 26.458 individual taxpayers registered at KPP Pratama South Semarang. The number of respondents sampled was 100 respondents who were taken randomly using the incidental sampling method. The data in this study were collected through questionnaires distributed to individual taxpayers registered at KPP Pratama South Semarang. The process of analyzing and processing data in this study using multiple linear regression analysis using the SPSS 25 program. The results of the study indicate that taxpayer awareness, service quality and modern tax administration system have a positive and significant effect on taxpayer compliance in individual taxpayers at KPP Pratama South Semarang.

Keywords: Taxpayer Awareness, Service Quality and Modern Tax Administration System

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus KPP Pratama Semarang Selatan)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan, dorongan dan perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPAi selaku Kajar Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, S.E., M.Si., SAS selaku Sekjur Akuntansi Syariah dan Wali Dosen serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Ari Kristin Prastyoningrum, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dwi Swasana Ramadhan, SE., M.SEI selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kanwil DJP Jawa Tengah 1 yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Nona pemilik NIM 1905046031. Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga saat ini. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan.
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan doa.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.


Penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 24 Juni 2023

Penulis



Shandy Pratama

NIM. 1905046099

DAFTAR ISI

MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN LITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. BATASAN MASALAH.....	9
1.3. RUMUSAN MASALAH.....	9
1.4. TUJUAN PENELITIAN.....	9
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1. TEORI DASAR	11
2.1.1. TEORI ATRIBUSI	11
2.1.2. PAJAK.....	12
2.1.3. PAJAK DALAM ISLAM	13
2.2. VARIABEL PENELITIAN	14
2.2.1. KEPATUHAN WAJIB PAJAK.....	14
2.2.2. KESADARAN WAJIB PAJAK	16
2.2.3. KUALITAS PELAYANAN	18
2.2.4. SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN	20
2.3. PENELITIAN TERDAHULU.....	22
2.4. KERANGKA BERPIKIR	32
2.5. RUMUSAN HIPOTESIS.....	32
2.4.1. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.....	32
2.4.2. PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.....	33

2.4.3.	PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.....	33
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1.	JENIS PENELITIAN.....	35
3.2.	POPULASI DAN SAMPEL	35
3.3.	JENIS DAN SUMBER DATA	36
3.4.	PENGUKURAN VARIABEL.....	37
3.4.1.	VARIABEL INDEPENDEN	37
3.4.2.	VARIABEL DEPENDEN	38
3.5.	DEFINISI OPERASIONAL	38
3.6.	TEKNIK ANALISIS DATA	40
3.5.1.	ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF.....	40
3.5.2.	UJI INSTRUMEN PENELITIAN	41
3.5.3.	UJI ASUMSI KLASIK	41
3.5.4.	ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA	42
3.5.5.	UJI STATISTIK.....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1.	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	44
4.1.1.	GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN	44
4.1.2.	TUGAS DAN FUNGSI KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN.....	44
4.1.3.	VISI DAN MISI KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN	45
4.1.4.	KODE ETIK KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN	46
4.1.5.	DESKRIPTIF OBJEK PENELITIAN	48
4.2.	TEKNIK ANALISIS DATA	51
4.2.1	ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF.....	51
4.2.2	UJI INSTRUMEN PENELITIAN	53
4.2.3	UJI ASUMSI KLASIK	58
4.2.4	ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA	62
4.2.5	UJI STATISTIK.....	65
4.3.	PEMBAHASAN ANALISIS HASIL DATA	67
4.3.1	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	67
4.3.2	PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.....	69
4.3.3	PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	70
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	72

5.1.	KESIMPULAN.....	72
5.2.	KETERBATASAN PENELITIAN	72
5.3.	SARAN-SARAN	73
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018 – 2022.....	4
Tabel 1.2 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Skala Pernyataan Persetujuan	37
Tabel 3.2 Definisi Operasional	38
Tabel 4.1 Distribusi Sampel	48
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	49
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	50
Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	51
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	52
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Reabilitas	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	63
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	65
Tabel 4.14 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rasio Pajak 5 Negara Asia Tenggara	2
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	32
Gambar 4.1 Hasil Uji Histogram	58
Gambar 4.2 Hasil Uji P-Plots.....	58
Gambar 4.3 Hasil Uji Scatterplot.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang dilihat dari pembangunan yang mulai meluas di setiap sektor. Pemerintah membutuhkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit untuk meningkatkan pembangunan tersebut.¹ Sumber yang digunakan untuk pembangunan nasional berasal dari pendapatan negara baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya pembangunan nasional tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan terwujud. Maka dari itu, pemerintah melakukan peningkatan pendapatan negara yang salah satunya berasal dari sektor pajak.

Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah.² Pajak dapat diartikan sebagai iuran yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana atas iuran tersebut negara tidak memberikan timbal balik secara langsung kepada pembayar pajak.³ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Dalam perpajakan sendiri kita juga mengenal istilah rasio pajak, kemudian pengertian dari rasio pajak ini yaitu perbandingan dari penerimaan pajak yang dikumpulkan pada waktu tertentu dengan Produk Domesti Bruto (PDB) dimasa

¹ Ida Ayu Dewi Widnyani dan Ketut Alit Suardana, "Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16.3 (2016), 2176–2203 (hal. 2177).

² K. A. Dharma, G. P. E., & Suardana, "Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak," *E-Jurnal Akuntansi*, 6.1 (2014), 340–53 (hal. 341).

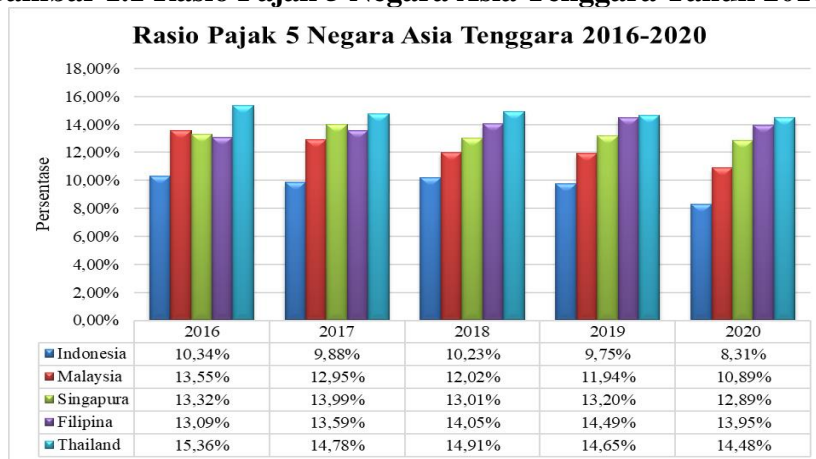
³ Jotopurnomo Cindy dan Mangoting Yenni, "Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya," *Tax & Accounting Review*, 1 (2013), 51 (hal. 50).

⁴ Undang-undang nomor 43 tahun 2007, "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," 2000 (2007).

yang sama. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat rasio pajak, faktor nya sendiri dibagi menjadi dua yaitu mikro dan makro, dalam faktor makronya antara lain dari tarif pajak, tingkat pendapatan per-kapita, dan tingkat optimalisasi tata pelaksanaan pemerintah yang baik.⁵

Menurut Fuad Rahmani, rendahnya tax ratio Indonesia disebabkan beberapa faktor sebagai berikut, yang pertama, adanya perbedaan perhitungan / rumusan *tax ratio* yang digunakan Indonesia dan negara-negara lain. Perbedaan ini dapat dilihat di negara-negara OECD dengan negara-negara berkembang. Selain itu, rendahnya *tax ratio* Indonesia disebabkan oleh rendahnya *tax coverage*.⁶ Berikut merupakan perbandingan *tax ratio* di Indonesia dengan beberapa negara Asia Tenggara.

Gambar 1.1 Rasio Pajak 5 Negara Asia Tenggara Tahun 2016-2020



Sumber: World Bank⁷

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa rasio pajak pada masing-masing lima negara yang ada di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand) mengalami fluktuatif. Dari ke lima Negara tersebut Negara Indonesia berada di urutan terendah setiap tahunnya yaitu berada dibawah 11%, sedangkan yang paling tinggi untuk rasio pajak nya yaitu Negara Thailand bisa mencapai 15%.

⁵ Vivi Kumalasari Subroto, “Memahami Arti Tax Ratio”, <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Memahami-Arti-Tax-Ratio>, diakses pada Kamis, 01 Juni 2023

⁶ Kemenkeu.go.id, “Perbandingan Komponen dan Struktur Pajak OECD dan *Government Finance Statistic Manual* dan Pengaruhnya atas Pendefinisian *Tax Ratio* di Indonesia”, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perbandingan-komponen-dan-struktur-pajak-oecd-dan-government-finance-statistic-manual-dan-pengaruhnya-atas-pendefinisiantax-ratio-di-indonesia>, diakses Kamis, 14 September 2023

⁷ The World Bank, <https://data.worldbank.org/country>, diakses 14 September 2023

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak diperlukan upaya yang lebih dari Direktorat Jenderal Pajak. Pemberian inovasi tentunya dapat membangkitkan rasa tanggung jawab terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal tersebut dikarenakan sistem perpajakan yang berlaku saat ini yang berupa *self assesment system* dimana dengan kondisi wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri wajib pajak, sementara fiskus pajak memiliki peran sendiri untuk mengawasinya. Ditambah dengan adanya penerapan sistem administrasi perpajakan yang modern dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi menjadi lebih baik dan memudahkan wajib pajak untuk melakukan dengan secara mandiri. Dengan adanya kondisi tersebut dimaksudkan agar dapat dipenuhi secara maksimal dengan adanya kesadaran dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak merupakan suatu norma.⁸ Wajib pajak patuh tidak hanya sekedar membayar pajak dan tertib melaporkan pajak, melainkan wajib pajak harus mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Apabila wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan kerugian yang besar bagi negara. Karena wajib pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara.

⁸ Ni Luh Putu Yunika Antari dan Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP," *E-Jurnal Akuntansi*, 26.28 (2019), 221 (hal. 223) <<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p09>>.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018 – 2022
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak (Persen)	Penerimaan Bukan Pajak	Persentase Penerimaan Bukan Pajak (Persen)
2018	1.518.789,80	19	409.320,20	19
2019	1.546.141,90	20	408.994,30	19
2020	1.285.136,32	16	343.814,21	16
2021	1.547.841,10	20	458.493,00	22
2022	1.924.937,50	25	510.929,60	24

Sumber: www.bps.go.id, 2022

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak dan mengalami fluktuatif dari tahun 2018 – 2022, sedangkan penerimaan dari sektor bukan pajak mengalami fluktuatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara.

Tabel 1.2
Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP Pratama Semarang Selatan (2018-2022)

Tahun	Total Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Laport SPT	Persentase Kepatuhan
2019	20.135	8.580	42,61%
2020	23.366	8.726	37,34%
2021	24.651	8.886	36,04%
2022	26.031	10.350	39,76%
2023	26.458	8.130	30,72%

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I

Berdasarkan data diatas menjelaskan persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Hal tersebut mengartikan kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan agar semakin sadar akan hak dan kewajiban dalam perpajakan.

Selain itu, ada juga masalah yang ditemui oleh wajib pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun dimana Direktorat Jenderal Pajak seringkali mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang terkadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan menyebabkan terlambat dalam melaporkan SPT. Berdasarkan permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak terutang dan melaporkannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut diantaranya kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern. Jadi, dapat dikatakan bahwa wajib pajak sebagai warga negara yang taat aturan harus senantiasa mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh negara.

Kesungguhan dan keinginan wajib pajak mematuhi kewajiban pajak merupakan cerminan kesadaran wajib pajak yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak perihal fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak akan pembayaran dan pelaporan pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dimana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, semakin tinggi pula kesadaran membayar pajak, dan masyarakat juga lebih kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, khususnya kebijakan di bidang perpajakan.⁹ Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menyebabkan perlawanan terhadap pajak berupa melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun secara ilegal. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila didalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu kualitas pelayanan pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan

⁹ Saifudin & Jumiati Novitasari, 'Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Semarang Barat Dan KPP Pratama Semarang Gayamsari)', *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 16.2 (2020), 97-105 (p. 98).

pelayanan publik yang lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus tentunya berpengaruh besar terhadap wajib pajak ketika melakukan pelaporan pajak. Kualitas pelayanan juga dinilai sebagai perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh wajib pajak dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyedia layanan.¹¹ Kesigapan untuk membantu, keramahan dalam pelayanan serta kepekaan terhadap situasi dan kondisi yang diberikan oleh fiskus terhadap wajib pajak akan membuat rasa puas dan nyaman ketika mendapatkan bantuan pengurusan kewajiban pajak. Hal tersebut tentu memberi motivasi dan kesadaran dari wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan juga keberhasilan dalam melaporkan pajaknya.

Didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi pada perpajakan yang menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif. Pentingnya peran modernisasi administrasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bahwa prosedur pajak perlu dibuat lebih sederhana dan mudah dalam upaya meningkatkan kepatuhan.¹² Permasalahan yang menjadi utama sampai saat ini adalah belum semua wajib pajak bisa memahami mengenai sistem administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan beberapa alasan, misalnya wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan.¹³ Hal tersebut dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang pengoperasian *e-Filing* dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan *e-Filing* masih minim. Selain itu, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara *online* masih kurang dipahami oleh calon wajib pajak karena kebingungan dalam pengoperasian

¹⁰ Rita J. D. Atarwaman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi*, 6.1 (2020), 39–51 (hal. 21).

¹¹ Yunika Antari, Ni Luh Putu, dan Ni Luh Supadmi. 2019. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP." *E-Jurnal Akuntansi* 26(28), 221-250 (hal.227). doi: 10.24843/eja.2019.v26.i01.p09.

¹² Ibid. (hal. 225)

¹³ Septiyani Nur Khasanah dan Amanita Novi Y., 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013', *Jurnal Profita*, 4.8 (2016), 1-13 (p. 2).

dan pengisian. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan yang cukup dari wajib pajak agar terwujudnya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang akan selalu *update* sesuai perkembangan zaman.

KPP Pratama Semarang Selatan merupakan salah satu unit vertikal yang berada di bawah naungan wilayah DJP Jawa Tengah I. Jumlah wajib pajak yang terdaftar disana masih sedikit dibandingkan dengan KPP Pratama di tempat lain yang berada di Wilayah Kota Semarang. Selain itu, KPP Pratama Semarang Selatan juga hanya menaungi 1 kecamatan saja, yaitu kecamatan Semarang Selatan. Disana menaungi 10 kelurahan Bulustalan, Randusari, Barusari, Mugassari, Pleburan, Wonodri, Peterongan, Lamper Lor, Lamper Kidul, dan Lamper Tengah.

Beberapa penelitian terdahulu sudah mengkaji tentang penelitian tersebut. Penelitian oleh Yunika dan Supadmi¹⁴ menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut sejalan dengan Rika¹⁵ yang menyatakan bahwa adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghailina¹⁶ bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut sejalan juga dengan Rita¹⁷ yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Idzhar dan Kurnia¹⁸ mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap

¹⁴ Yunika Antari, Ni Luh Putu, dan Ni Luh Supadmi. 2019. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP." *E-Jurnal Akuntansi* 26(28), 221-250.

¹⁵ Rika Indah Sasmita, "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Jurnal Mitra Manajemen* Edisi Oktober, 3.10 (2019). 946-1037.

¹⁶ Nur Ghailina As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ekobis Dewantara* 1.6(2018). 64-76.

¹⁷ Rita J. D. Atarwaman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi*, 6.1 (2020), 39-51

¹⁸ Idzhar Syah Pradhita & Kurnia, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Serang Barat Tahun 2020)." *e-Proceeding of Management*. 9.5(2022), 3201-3209

kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan Ardi, dkk¹⁹ mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian oleh Dessy²⁰ mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana²¹ dan Frenky²² yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoeriyah dan Titik²³ menjelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian oleh Yunita dan Ketut²⁴ yang mengatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian oleh Rika²⁵ dan Anita²⁶ yang mengatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap**

¹⁹ M Ardi Wijaya, dkk. “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Teluk Betung”. *Jurnal Visionist*, 9.1(2020), 6-15

²⁰ Dessy Natalia Kumala Jaya, “Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DKI Jakarta,” *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3.2 (2019), 255

²¹ Oktaviana Agustania Waru, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Ruteng)”. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1.6(2018), 193-202

²² Frenky Situmorang, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Medan”. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP)*, 7.1(2020), 47-61

²³ Nur Khoeriyah & Titik Mildawati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10.11(2021), 1-18

²⁴ Ni Putu Yunita Sari dan I Ketut Jati, “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26.1(2019), 310-339

²⁵ Rika Indab Sasmita, “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Mitra Manajemen Edisi Oktober*, 3.10 (2019). 946-1037.

²⁶ Anita Primastiwi dan Ratih Dwi C, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 6.2(2021). 46-54

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Selatan)”.

1.2. BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti membuat batasan-batasan masalah yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh empat variabel yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sistem administrasi perpajakan modern, dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini lebih memfokuskan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

1.3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Semarang Selatan
- 2) Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Semarang Selatan
- 3) Bagaimana pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Semarang Selatan

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Semarang Selatan
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Semarang Selatan
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Semarang Selatan

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan gambaran tiap bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang diperlukan untuk menunjang penelitian, penelitian yang relevan, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan perihal waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum penelitian, proses pengujian dan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. TEORI DASAR

2.1.1. TEORI ATRIBUSI

Teori Atribusi merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan mengenai apa yang menjadi determinan atas suatu peristiwa dan menjawab pertanyaan “mengapa”, khususnya jika dihubungkan dengan penjelasan perilaku setiap individu. Kelley dan Michela menjelaskan teori atribusi merupakan teori mengenai bagaimana seseorang mencari tahu suatu penyebab. Berdasarkan penjelasan tersebut, teori atribusi juga dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, misalkan dalam memetakan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak.²⁷

Robbins menjelaskan bahwa Teori Atribusi merupakan teori yang mengemukakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang dimana mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal.²⁸ Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal merupakan perilaku yang berasal dari luar, yang merupakan perilaku seseorang yang dipandang sebagai akibat dari tekanan situasi atau lingkungan.²⁹

Selain faktor internal dan eksternal, Eberly et al dalam jurnal Fitri dan Erlina memperluas pembahasan teori atribusi dengan mengusulkan satu lagi faktor penyebab suatu peristiwa yang dipandang dari perspektif *dyad*, bukan hanya dari sudut pandang individu, yaitu faktor relasional. Faktor tersebut lebih ditekankan pada hubungan antara dua pihak. Faktor tersebut penting untuk

²⁷ Fitri Romadhon dan Erlina Diamastuti, “Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory,” *Jurnal Ilmiah Esai*, 14.1 (2020), 17–35 (hal. 21) <<https://doi.org/https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>>.

²⁸ Nur Khoeriyah dan Titik Mildawati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” 2017, hal. 2.

²⁹ Feni Widiarti dan Khalisah Viana, “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Model Penerimaan Teknologi (TAM) Sebagai Pemoderasi,” *Akuntansi Manajerial*, 6.2 (2021), 1–21 (hal. 4).

diperhatikan dalam menemukan model suatu peristiwa, terutama dalam konteks sosial, karena akan ada banyak faktor penyebabnya, sehingga tidak selalu dapat mengaitkan secara langsung dengan faktor internal ataupun faktor eksternal.³⁰

Teori ini relevan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu sistem administrasi perpajakan modern. Adapun perilaku yang disebabkan oleh faktor relasional yaitu kualitas pelayanan. Wajib pajak dalam menentukan keputusan untuk patuh atau tidak patuh dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari faktor tersebut dapat mendorong seseorang dalam pengambilan keputusan. Artinya pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung pada keputusan yang diambil dari wajib pajak.

2.1.2. PAJAK

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹ Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. mengatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³²

Pajak terdiri dari 4 fungsi, diantaranya sebagai berikut:³³

A. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

³⁰ Romadhon dan Diamastuti, hal. 21.

³¹ Setio Supto Nugroho, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," *Kementerian Sekretariat Negara*, 2009, 1–11.

³² Rita J. D. Atarwaman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi*, 6.1 (2020), 39–51 (hal. 2).

³³ Mardiasmo, "Perpajakan," Penerbit: Andi (Anggota IKAPI), 2010

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

B. Fungsi Mengatur (*regulerand*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

C. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

D. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3. PAJAK DALAM ISLAM

Selain penjelasan pajak secara umum seperti yang sudah dijelaskan diatas, ada juga pajak menurut Islam. Pajak dalam bahasa arab merupakan kata *Adh-Daribah* atau *Al-maks* atau juga disebut dengan *Al-Ushr* yang maknanya pungutan yang dilakukan oleh penarik pajak terhadap rakyat. Selain *Daribah*, ada juga *Jizyah* dan *Kharaj*. Perbedaan antara ketiga itu sendiri terletak pada objek yang dikenakan beban. *Dharibah* merupakan pajak yang dikenakan atas mal atau harta benda, yang hanya dilakukan oleh orang muslim. Sementara *Jizyah* dan *Kharaj* merupakan pajak yang dikenakan kepada orang Non-Muslim. *Jizyah* sendiri untuk menjamin keselamatan jiwa, sedangkan *Kharaj* untuk pembayaran tanah atau hasil bumi. Pajak *Al-Ushr* sendiri adalah tambahan kewajiban bagi kaum muslimin setelah adanya pembayaran zakat. Ketentuan *Al-Ushr* sendiri menurut Islam berbeda dengan sistem monversional, yang telah disampaikan oleh Fahmi dalam penelitian Fadhillah yaitu:

- a. *Al-Ushr* sifatnya kontemporer, yang tujuannya hanya sementara dalam pemungutan pajak, yaitu ketika kondisi baitul mal sedang krisis harta, akan tetapi jika baitul mal sudah mulai stabil maka kewajiban pajak tersebut dapat dihapuskan.
- b. *Al-Ushr* pungutannya sesuai dengan kebutuhan, tidak kurang ataupun lebih
- c. *Al-Ushr* pungutannya diambil dari orang-orang kaya yang memiliki harta lebih dari kebutuhan pokok menurut kelayakan masyarakat yang ada di daerah tersebut.
- d. *Al-Ushr* hanya di khususkan untuk kaum muslim, dan kaum non-muslim tidak ada kewajiban untuk ini
- e. *Al-Ushr* bisa dihilangkan apabila sudah tidak diperlukan kembali
- f. *Al-Ushr* mengumpulkan dana dengan tujuan penggalangan dana, tidak boleh lebih.

Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran mengenai “pajak”, yaitu dalam Q.S At-Taubah (9):29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝

Artinya : “perangilah wahai orang-orang tidak beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah beserta Rasul-nya dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang telah diberi kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tanduk.”

Ayat diatas menggambarkan bahwa *Jizyah* atau pajak hanya dibebankan kepada masyarakat non-muslim yang berkecukupan, sedangkan yang tidak mampu tidak perlu dikenakan pajak, karena pajak dibebankan sesuai dengan kondisi keuangan dan status sosial mereka.

2.2. VARIABEL PENELITIAN

2.2.1. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Menurut KBBI Daring, patuh diartikan sebagai suka menurut (perintah); taat (pada pemerintah, aturan); berdisiplin. Sementara kepatuhan

berarti sifat patuh atau ketaatan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.³⁴

Definisi dalam arti luas, bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.³⁵ Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarelawan (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk memutuskan sendiri kewajiban perpajakan dan selanjutnya melakukan pembayaran pajak dan melaporkan pajak terutang tersebut. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika:

1. Memahami undang-undang perpajakan;
2. Menghitung pajak dengan benar;
3. Membayar pajak tepat waktu dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT); serta
4. Tidak memiliki tunggakan pajak.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, dijelaskan bahwa kriteria wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- A. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- B. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

³⁴ Frenky Situmorang, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Medan," *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP)*, 7.1 (2020), 47–61 (hal. 49).

³⁵ Nur Ghailina As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1.6 (2018), 64-76 (hal. 67).

C. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan

D. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar

Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nur ayat 54:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Artinya: Katakanlah, "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul (Muhammad) itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas".

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada umat muslim untuk taat kepada-Nya dan taat kepada Rasul (Muhammad). Rasullullah mengajarkan kepada semua umat untuk taat akan perintah Allah dan menjauhi apa yang dlarang oleh Allah. Umat muslim berkewajiban memenuhi semua aturan termasuk kepatuhan wajib pajak untuk kebaikan dirinya.

2.2.2. KESADARAN WAJIB PAJAK

Kesadaran wajib pajak adalah kemauan yang ditimbulkan ketika wajib pajak mengetahui dan mengerti ketentuan perpajakan, sehingga dapat menumbuhkan rasa sukarela dalam menyikapi kewajiban pajaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, maka

pemahaman wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya semakin baik. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.³⁶

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.³⁷

Ada beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.³⁸

Adapun indikator dari Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak
2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap warga muslim tidak lepas dari tanggung jawab terhadap aturan kaidah Islam. Seperti halnya kewajiban seorang warga negara dalam ketaatan terhadap undang-undang perpajakan. Dimana bahwa setiap orang diwajibkan memenuhi hak dan kewajiban

³⁶ Fillanty Indah Sukma dan Anissa Yuniar Larasati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cimahi)," *Riset Akuntansi dan Perbankan*, 15.2 (2021), 517–35 (hal. 521)

³⁷ Nur Ghailina As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Ekobis Dewantara*, 1 (2018), 64–76 (hal. 66)

³⁸ Rita J. D. Atawarman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi*, 6.1 (2020), 39-51 (hal. 41)

membayar pajak. Islam mengajarkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Jika kita mengikuti aturan dalam Islam maka hidup kita akan sejahtera. Begitu juga jika diterapkan pada hak dan kewajiban perpajakan. Ketika kita menyadari bahwa pentingnya membayar pajak, maka akan berdampak kehidupan sejahtera dengan pembangunan yang merata.

2.2.3. KUALITAS PELAYANAN

Menurut *American Society for Quality Control*, Kualitas dapat diartikan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan dan bersifat laten. Sementara itu, pelayanan adalah suatu proses besutan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan sedangkan berkenaan dengan kegiatan pemerintahan.³⁹

Kualias pelayanan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian kepada masyarakat dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.⁴⁰

Kualitas pelayanan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Pelayanan yang berhubungan dengan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan yang diberikan oleh pegawai pajak dalam hal ini Fiskus kepada

³⁹ Dessy Natalia Kumala Jaya, "Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DKI Jakarta," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3.2 (2019), 255 (hal. 259)

⁴⁰ Nur Ghailina As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Ekobis Dewantara*, 1 (2018), 64–76 (hal. 66)

⁴¹ Frenky Situmorang, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Medan," *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP)*, 7.1 (2020), 47–61 (hal. 49)

masyarakat untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam perpajakan.⁴² Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh pegawai pajak.⁴³

Beberapa hal harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak diantaranya yaitu:⁴⁴

- A. Pelayanan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
- B. Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak;
- C. Pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan professional;
- D. Pelayanan yang adil dan tanpa biaya;
- E. Budaya kerja yang tinggi, responsive dan efektif; dan
- F. Kepuasan Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab KPP.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keandalan
2. Ketanggapan
3. Jaminan
4. Empati
5. Bukti Langsung

Allah Swt. berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri

⁴² Atarwaman, hal. 42.

⁴³ Ni Luh Putu Yunika Antari dan Ni Luh Supadmi, "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP," *E-Jurnal Akuntansi*, 26.28 (2019), 221 (hal. 226) <<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p09>>.

⁴⁴ Situmorang, hal. 49.

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang muslim diwajibkan untuk senantiasa memperbaiki hidup. Allah akan memberikan kemudahan kepada umat muslim yang terus memperbaiki kualitas hidupnya. Begitu juga dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak untuk terus memperbaiki kualitasnya. Dengan harapan semakin memperbaiki kualitas pelayanan akan semakin nyaman masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak.

2.2.4. SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN

Administrasi perpajakan merupakan kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan setiap orang yang ada di suatu organisasi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem administrasi pajak mengenai perubahan atas hasil pengelolaan sangat mempengaruhi dan berguna untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai penanggung jawab kepentingan terhadap pajak. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan suatu kegiatan dalam perpajakan dalam hal bidang administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak di suatu negara.⁴⁵

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini merupakan indikasi positif dari pihak pemerintah untuk secara bersama-sama dengan masyarakat Wajib Pajak mengelola pajak secara efektif dan efisien. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa dasar pertimbangan dicanangkannya Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah untuk meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan negara dari sektor pajak, serta meningkatkan kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak.⁴⁶

⁴⁵ Idzhar Syah Pradhitya dan Kurnia, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Serang Barat Tahun 2020)," *e-Proceeding of Management*, 9.5 (2022), 3201–9 (hal. 3203).

⁴⁶ M. Ardi Wijaya, Tina Miniawati Barusman, dan Defrizal, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ditujukan untuk menerapkan *good governance* yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang andal dan terkini serta memberikan pelayanan prima sekaligus pengawasan yang intensif kepada wajib pajak.⁴⁷

Sistem administrasi perpajakan modern dibuat dengan salah satu sasaran meningkatkan kualitas pelayanan, maka dari itu dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang baik maka akan mendukung kepatuhan wajib pajak yang lebih baik. Sistem administrasi perpajakan modern diharapkan mampu menghilangkan keragu-raguan wajib pajak dengan turut berkontribusi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.⁴⁸

Adapun indikator dari sistem administrasi perpajakan modern ini diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem Administrasi Berbasis Online
2. Efektivitas Pengawasan Pajak
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Professional

Allah Swt. berfirman dalam surah Yunis ayat 101:

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِي ۙ اٰلِآءِئِثْ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ

Artinya: Katakanlah, "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi!" Tidaklah bermanfaat tanda-tanda (kebesaran Allah) dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman."

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. meminta kepada umat muslim untuk memperhatikan fenomena yang ada di langit dan bumi yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Dari fenomena tersebut umat muslim mengkaji, meneliti dan mencermati untuk pengembangan khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu juga dengan teknologi yang

Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung," *Jurnal Visionist*, 9.1 (2020), 6–15 (hal. 8).

⁴⁷ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: *Rekayasa Sains*, ed. oleh Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*, Cetakan Pe (Bandung: *Rekayasa Sains Bandung*, 2017), hal. 119.

⁴⁸ Henny Zurika Lubis dan Prayogi Irawan Sukoco, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *SiNTESa*, 1 (2021), 583–89 (hal. 584) <<https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/25340>>.

digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin guna meningkatkan pelaksanaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

2.3. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Variabel Independent	Variabel Dependent	Teori (Jika Ada)	Alat Analisis	Hasil
1	Oktaviana Agustania Waru (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Modernisasi Sistem Adminstrasi Perpajakan 3. Kualitas Pelayanan Pajak 4. Kesadaran Wajib Pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Theory of Planned Behavior</i>	Penyebaran Kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 4. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap

							kepatuhan Wajib Pajak
2	Ni Luh Putu Yunika Antari & Ni Luh Supadmi (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP	1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern 2. Kualitas Pelayanan 3. Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Theory of Planned Behavior</i>	Penyebaran Kuesioner	1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif pada Kepatuhan WPOP 2. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif pada Kepatuhan WPOP 3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan WPOP
3	Deti Ratnasari (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap	1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern 2. Kualitas Pelayanan Fiskus 3. Kesadaran Wajib Pajak 4. Tingkat Penghasilan 5. Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Theory of Planned Behavior</i>	Penyebaran Kuesioner	1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP UMKM 2. Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP UMKM

		Kepatuhan WPOP UMKM					<p>3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP UMKM</p> <p>4. Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP UMKM</p> <p>5. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP UMKM</p>
4	Anita Primastiwi & Ratih Dwi C (2021)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern 2. Religiusitas 3. Kesadaran Wajib Pajak 4. Kualitas Pelayanan Fiskus 	Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Theory of Planned Behavior</i>	Penyebaran Kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Kesadaran Wajib Pajak

							tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 4. Kualitas Pelayanan Fiskusi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5	Nur Ghailina As'ari (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Peraturan Perpajakan 2. Kualitas Pelayanan 3. Kesadaran Wajib Pajak 4. Sanksi Pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak	-	Penyebaran Kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 4. Sanksi Pajak berpengaruh positif

							signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6	Rika Indah Sasmita (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sistem Administrasi Perpajakan Modern 6. Kesadaran Wajib Pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak	-	Penyebaran Kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sistem Administrasi Perpajakan Modern tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 6. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7	Ni Putu Yunita Sari & I Ketut Jati (2019)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Kualitas Pelayanan Fiskus 	Kepatuhan Wajib Pajak	Teori Atribusi	Penyebaran Kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak 2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak 3. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif pada

							Kepatuhan Wajib Pajak
8	Dessy Natala Kumala Jaya (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak 2. Kualitas Pelayanan 3. Pengetahuan PPN 	Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Theory of Planned Behavior & Teori Atribusi</i>	Penyebaran Kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Kualitas Pelayanan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Pengetahuan PPN berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
9	Rita J. D. Atarwaman (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Sanksi Pajak 3. Kualitas Pelayanan Pajak 	Kepatuhan Wajib Pajak	Teori Atribusi	Penyebaran Kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan

							signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
10	M. Ardi Wijaya, Tina Miniawati Barusman & Defrizal (2020)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	1. Sistem Adminstrasi Perpajakan Modern 2. Kualitas Pelayanan Fiskus	Kepatuhan Wajib Pajak	-	Penyebaran Kuesioner	1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
11	Frenky Situmoran g (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap	1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Kualitas Pelayanan Fiskus	Kepatuhan Wajib Pajak	-	Penyebaran Kuesioner	1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap

		Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi					Kepatuhan Wajib Pajak 2. Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
12	Nur Khoeriyah & Titik Mildawati (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Sanksi Perpajakan 3. Sistem Administrasi Perpajakan Modern	Kepatuhan Wajib Pajak	Teori Atribusi	Penyebaran Kuesioner	1. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
13	Herman & Waluyo (2021)	<i>The Effect of Tax Planning Aspects and Tax</i>	1. <i>Formal Aspect</i>	<i>Taxpayer Compliance</i>	<i>Theory of Compliance</i>	<i>Sharing Questioners</i>	1. <i>The Formal Aspect affect</i>

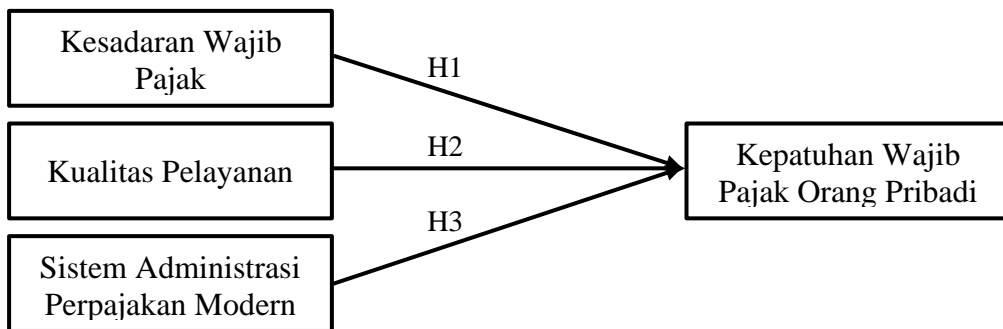
		<i>Awareness to the UMKM Taxpayer Compliance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Material Aspect</i> 3. <i>Tax Planning</i> 4. <i>Taxpayer Awareness</i> 				<p><i>the Taxpayer Compliance</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>The Material Aspect affect the Taxpayer Compliance</i> 3. <i>Tax Awareness don't affect the Taxpayer Compliance</i>
14	Erika Zahra Afifah Syafira & R. Nasution (2021)	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Perpajakan 2. Kualitas Pelayanan 	Kepatuhan Wajib Pajak	-	Penyebaran Kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
15	Romasi Lumban Gaol (2021)	<i>The Effect of the Implementation of Modern Tax Administration System on Corporate Taxpayer Compliance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Modern Tax Administration System</i> 	<i>Taxpayer Compliance</i>	-	<i>Sharing Quesioners</i>	<i>Modern Tax Administration System has a positive effect significant on Taxpayer Compliance</i>
16	Hartanti, dkk (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi Perpajakan 	Kepatuhan Wajib Pajak	-	Penyebaran Kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh

		Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	3. Kesadaran Wajib Pajak				positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
17	La Ode Hasiara & Sailawati (2022)	<i>A Scope Analysis on Tax Amnesty Toward Taxpayer Compliance in Paying Taxes in Samarinda - Indonesia</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Quality Tax Service</i> 2. <i>Education Taxpayer</i> 3. <i>Tax Sanctions</i> 4. <i>Socialization Taxpayer</i> 5. <i>Taxpayer Knowledge</i> 	<i>Tax Compliance</i>	-	Penyebaran Kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Quality Tax Service has a significant effect on Tax Compliance</i> 2. <i>Education Taxpayer has a significant effect on Tax Compliance</i> 3. <i>Tax Sanctions has a significant effect on Tax Compliance</i> 4. <i>Socialization Taxpayer has a significant effect on Tax Compliance</i> 5. <i>Taxpayer Knowledge has a significant effect on Tax Compliance</i>

18	Intan Arsitia Djafri, dkk (2023)	<i>Utilization of Information and Communication Technology in the Tax Administration System to Increase Taxpayer Compliance</i>	<i>1. Modern Tax Administration System</i>	<i>Taxpayer Compliance</i>	-	<i>Sharing Quesionerr</i>	<i>1. Modern Tax Administration System has a effect on Taxpayer Compliance</i>
----	---	---	--	----------------------------	---	---------------------------	--

2.4. KERANGKA BERPIKIR

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, berikut kerangka pemikiran teoritis yang disajikan dalam bentuk gambar:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.5. RUMUSAN HIPOTESIS

2.4.1. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, maka pemahaman wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya semakin baik. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunika & Supadmi; Rika; dan Hartanti, dkk mengatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita & Dwi; Khoeriyah & Titik; dan Herman & Waluyo yang mengatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.2. PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Kualitas Pelayanan Pajak dapat diartikan sebagai kegiatan yang diberikan oleh pegawai pajak dalam hal ini Fiskus kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam perpajakan. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh pegawai pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita & Jati; Deti; dan Erika & Nasution mengatakan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana; Ghailina dan Frenky yang mengatakan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.3. PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Administrasi perpajakan merupakan kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan setiap orang yang ada di suatu organisasi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan suatu kegiatan dalam perpajakan dalam hal

bidang administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak di suatu negara. Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ditujukan untuk menerapkan *good governance* yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang andal dan terkini serta memberikan pelayanan prima sekaligus pengawasan yang intensif kepada wajib pajak. Dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang baik akan mendukung kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Dessy; Ardi, dkk; dan Romasi mengatakan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana; Rika; dan Anita & Ratih yang mengatakan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang bersifat asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif dikarenakan akan lebih banyak menggunakan data secara numerikal atau angka yang diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS dengan menggunakan analisis logistik. Dalam penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas (variabel independen) dengan variabel terikat (variabel dependen) untuk menguji hipotesis yang ada. Tujuannya untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji pengaruh variabel bebas (kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sistem administrasi perpajakan modern) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).

3.2. POPULASI DAN SAMPEL

3.2.1. POPULASI

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan tahun 2023. Jumlah populasi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan tahun 2023 sebanyak 26.458 wajib pajak orang pribadi. Data keseluruhan tersebut diperoleh dari KPP Pratama Semarang Selatan

3.2.2. SAMPEL

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling*, yang diambil dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan yang bersedia untuk dijadikan responden. Dalam menentukan jumlah sampel pada penelitian ini berdasarkan rumus slovin. Berikut adalah perhitungan sampel pada penelitian ini:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{26.458}{1 + 26.458(0.1)^2}$$

$$n = \frac{26.458}{1 + 264,58}$$

$$n = \frac{26.458}{265,58}$$

$$n = 99.62 (100)$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yang dapat diambil untuk dijadikan sampel sebanyak 100 responden.

3.3. JENIS DAN SUMBER DATA

3.3.1. JENIS DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan jenis penelitian dengan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sementara data sekunder merupakan jenis penelitian dengan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian.

3.3.2. SUMBER DATA

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Untuk data primer bersumber dari pengambilan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Untuk data sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, media internet dalam situs perpajakan, situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari KPP Pratama Semarang Selatan.

3.3.3. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data primer sebagai data utama dengan menggunakan skala *likert* 4 (empat) poin dalam perhitungan hasilnya. Responden menentukan tingkat persetujuan yang telah disediakan terhadap suatu pernyataan yang disediakan dalam kuesioner. Terdapat 4 (empat) skala tingkatan persetujuan, mulai dari 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (setuju); dan 4 (sangat setuju).

Tabel 3.1
Skala Pernyataan Persetujuan

No	Pernyataan Persetujuan	Skor
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Netral (N)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

3.4. PENGUKURAN VARIABEL

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen terdiri dari kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sistem administrasi perpajakan modern. Variabel dependen terdiri dari kepatuhan wajib pajak.

3.4.1. VARIABEL INDEPENDEN

Variabel independen atau biasa disebut variabel bebas merupakan variabel yang menjelaskan, mempengaruhi serta menerangkan variabel lain yang menyebabkan adanya perubahan pada variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen biasa disingkat dengan variabel (X).

Beberapa indikator dari variabel Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Persepsi Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak;
- 2) Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak;
- 3) Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

Beberapa indikator dari variabel Kualitas Pelayanan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Keandalan
- 2) Ketanggapan
- 3) Jaminan
- 4) Empati
- 5) Bukti Langsung

Beberapa indikator dari variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Sistem Administrasi
- 2) Efektivitas Pengawasan
- 3) Sumber Daya Manusia (SDM) Profesional

3.4.2. VARIABEL DEPENDEN

Variabel dependen atau biasa disebut variabel terikat merupakan variabel yang dijadikan sebuah acuan utama untuk dijelaskan. Variabel dependen biasa terdapat pada bagian latar belakang dan disingkat dengan variabel (Y).

Beberapa indikator dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu
- 3) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar

3.5. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam pembahasan ini lebih mengarah kepada aspek hubungan antar variabel pada penelitian yang diantaranya meliputi variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel yang berupa kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Variabel independent atau yang biasa disebut variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu kesadaran wajib pajak (X1), kualitas pelayanan (X2), dan sistem administrasi perpajakan modern (X3).

Tabel 3.2

Definisi Operasional

No	Definisi	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ● Kepatuhan untuk mengisi dan melaporkan surat 	Likert

	<p>Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu dalam Ghailina: 2018).</p>	<p>pemberitahuan (SPT) tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar 	
2	<p>Kesadaran Wajib Pajak (X1)</p> <p>Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution dalam Ghailina: 2018).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak; ● Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak; ● Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. 	Likert
3	<p>Kualitas Pelayanan (X2)</p> <p>Kualitas Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono dalam Ghailina: 2018).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Keandalan ● Ketanggapan ● Jaminan ● Empati ● Bukti Langsung 	Likert

4	<p>Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)</p> <p>Sistem Administrasi Perpajakan Modern merupakan kegiatan yang menerapkan <i>good governance</i> dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan memberikan pelayanan prima serta pengawasan yang intensif kepada wajib pajak (Siti Kurnia: 2017).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sistem Administrasi Berbasis Online ● Efektivitas Pengawasan Pajak ● Sumber Daya Manusia (SDM) Professional 	Likert
---	---	---	--------

3.6. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan perangkat lunak komputer SPSS 25 untuk menguji variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sistem administrasi perpajakan modern dengan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.

3.6.1. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Analisis Deskriptif merupakan metode yang dilakukan berupa pengumpulan data sehingga memberikan informasi tentang data yang dimiliki dengan ringkas dan dapat memberi inti dari kumpulan data yang ada. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *range*, *sum*, *skewness* (kecondongan distribusi).

Dengan penggunaan analisis deskriptif dapat diketahui gambaran pengaruh variabel bebas (kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sistem administrasi perpajakan modern) dengan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) kondisi dari objek penelitian.

3.6.2. UJI INSTRUMEN PENELITIAN

Uji instrumen penelitian merupakan proses menganalisa data dengan teknik mensistematisakan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara yang dilakukan dan dipahami agar bisa menyajikan apa yang didapat dari orang lain. Analisis data instrumen memiliki tujuan untuk mencari makna atau arti dari objek peneliti dari data yang didapat. Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua uji, yaitu uji validitas dan uji reabilitas.

3.6.2.1. UJI VALIDITAS

Uji validitas merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner (Imam Ghazali: 2013). Sebuah kuesioner dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu sendiri. Dengan kata lain uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan dari instrumen penelitian.

3.6.2.2. UJI REABILITAS

Uji reabilitas merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel (Imam Ghazali: 2013). Uji reabilitas dilakukan untuk mengukur kevalidan atau reliabel serta handal dalam menjawab pertanyaan seseorang dengan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jika koefisien reabilitas lebih dari 0,60 dapat dikatakan pengujian tersebut reliabel atau handal.

3.6.3. UJI ASUMSI KLASIK

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk menghasilkan model yang baik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Adapun Uji Asumsi Klasik yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

3.6.3.1. UJI NORMALITAS

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel pengganggu atau *residual* mempunyai distribusi normal. Uji statistik yang digunakan antara lain grafik histogram, *kolmogorov-smirnov*, dan *probability plots*. Untuk melihat sebaran data secara normal maupun tidak

bisa dilihat pada bagian *Histogram-Normality test*. Jika nilai *probability* lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai *probability* lebih kecil dari 0,05 maka data dikatakan tidak berdistribusi normal.

3.6.3.2. UJI MULTIKOLINERITAS

Uji Multikolineritas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel dalam model regresi. Gejala multikolineritas dapat diketahui dari nilai koefisien. Jika koefisien korelasi lebih dari 0,9 maka terjadi indikasi gejala multikolineritas dalam model tersebut. Sebaliknya, jika koefisien korelasi kurang dari 0,9 maka tidak terjadi indikasi gejala multikolineritas.

3.6.3.3. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance n* dari residual suatu data ke data yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan *Uji Kolmogorov-Smirnov* dengan cara melihat nilai *Asymp-Sig*. Jika nilai *Asymp-Sig* lebih besar dari 0.05 maka data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai *Asymp-Sig* lebih kecil dari 0.05 maka data terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.6.4. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Uji Regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel dependen dan variabel independen. Hasil pengujian ini untuk dapat di tafsirkan dengan tepat apabila dalam pengujian ini bebas dari pelanggaran asumsi klasik. Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut ini:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Kualitas Pelayanan

X_3 = Sistem Administrasi Perpajakan Modern

e = Error

3.6.5. UJI STATISTIK

3.6.5.1. UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER INDIVIDUAL

(UJI T)

Uji T disebut juga dengan uji parsial merupakan pengujian dengan tujuan memeriksa signifikan per variabel bebas terhadap variabel terkait. Pedoman pengambilan kesimpulan untuk uji t adalah:

1. Hipotesis

H_0 : $b_1 = 0$, menunjukkan tidak terdapat pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terkait.

H_1 : $b_1 \neq 0$, menunjukkan terdapat pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terkait.

2. Pengambilan keputusan

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $sig > 0.05$ (5%), maka H_0 diterima

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ atau $sig \leq 0.05$ (5%), maka H_0 ditolak.

Nilai t table ditentukan dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$

3.6.5.2. UJI KOEFISIEN DETERMINAN (UJI R^2)

Uji koefisien determinan atau yang disebut nilai R^2 digunakan untuk mengetahui terhadap besarnya variabel bebas yang menguraikan variabel terikat. Nilai R^2 berada diantara 0 – 1. Ketika nilai R^2 semakin dekat dengan 1, dapat digambarkan cukup kuat dalam menjelaskan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya ketika nilai R^2 semakin dekat dengan 0, dapat digambarkan keterbatasan variabel bebas dengan variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1.1. GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Selatan merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Wilayah kerja KPP Pratama Semarang Selatan berada di kota Semarang, tepatnya berlokasi di Gedung Keuangan Negara I Semarang Lantai 1 dan 2, Jalan Pemuda Nomor 2 Semarang.

Wilayah kerja KPP Pratama Semarang Selatan terdiri dari satu kecamatan, yaitu kecamatan Semarang Selatan. Letak Kecamatan Semarang Selatan berada di tengah-tengah wilayah Kota Semarang. Secara geografi berada pada 110.24'07.2" sampai dengan 110.26'58.2" Bujur Timur dan 6.58'52.0 sampai dengan 7.00'41.2" Lintang Selatan.

Kecamatan yang berada di Semarang Selatan memiliki luas 526,11 hektar yang mencakup terdiri dari sepuluh kelurahan di dalamnya, diantaranya Bulustalan, Randusari, Barusari, Mugassari, Pleburan, Wonodri, Peterongan, Lamper Lor, Lamper Kidul, dan Lamper Tengah.

4.1.2. TUGAS DAN FUNGSI KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, fungsi dan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat
2. Pendaftaran wajib pajak, pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak secara Jabatan, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak

3. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
4. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan
5. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan
6. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
7. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak
8. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak
9. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak
10. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dan pengawasan serta pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak
11. Pengawasan kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan internal
12. Pelaksanaan dan edukasi wajib pajak orang pribadi baru
13. Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan pada wajib pajak
14. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu kantor pelayanan pajak madya
15. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan
16. Pelaksanaan administrasi kantor

4.1.3. VISI DAN MISI KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan menggunakan Visi dan Misi yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 – 2024, berikut adalah Visi, Misi dan Tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak:

a. Visi

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan

Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

b. Misi

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, Edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi

c. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

4.1.4. KODE ETIK KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN

1. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945
Melalui kode etik ini diharapkan seluruh pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak dapat menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjaga citra, harkat, dan martabat lembaga
Seluruh pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak dituntut untuk selalu menjaga citra, harkat, dan martabat lembaga.
3. Menjadi teladan dalam bersikap dan bertingkah laku
Seluruh pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak wajib menjadi teladan dengan cara menjunjung tinggi norma yang berlaku di masyarakat.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan
Pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan mencontohkan sikap taat pajak.

5. Memegang teguh sumpah sebagai PNS
Pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang wajib memegang teguh sumpah PNS saat diangkat.
6. Menghindari benturan kepentingan
Pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak wajib menghindari benturan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
7. Menyampaikan wajib pajak untuk tidak memberi apapun Pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak dilarang menerima apapun dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Bersikap netral dalam pemilihan
Pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak harus bersikap netral pada saat pemilihan calon presiden, kepala daerah, maupun anggota legislatif pusat dan daerah.
9. Bijak dan santun bermedia sosial
Pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak harus menggunakan media sosial secara bijak dan santun serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.
10. Jujur, akuntabel, dan transparan
Pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak juga harus berbicara serta bertindak jujur, akuntabel, dan transparan. Ini termasuk menyampaikan fakta, kebenaran, dan ketentuan yang berlaku.
11. Mewujudkan pola hidup sederhana
Pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak dituntut untuk mewujudkan pola hidup sederhana sebagai bentuk empati kepada masyarakat dan kepada sesama pegawai.
12. Tidak meminta dan/atau menerima sponsorship
Pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak dilarang menerima maupun meminta sponsorship dari wajib pajak, rekanan, peserta tender/lelang, atau pihak lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan di dalam maupun di luar kantor.
13. Tidak mengikuti seminar yang dibiayai pihak lain

Pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak dilarang mengikuti seminar di dalam maupun di luar negeri yang dibiayai oleh rekanan, peserta lelang, atau pihak lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.

14. Tidak menyebarkan konten sensitif di media sosial

Pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak dilarang mengunggah, like, dan/atau share konten yang mengandung unsur hoaks, pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap LGBT, isu SARA, dan pandangan politik melalui media sosial.

15. Tidak menemui wajib pajak atau pihak lain di luar kantor

Pejabat dan/atau pegawai Dirjen Pajak dilarang menemui wajib pajak atau pihak lain di luar kantor atau di luar lokasi usaha wajib pajak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

4.1.5. DESKRIPTIF OBJEK PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menentukan objek terlebih dahulu dimana populasi yang diambil yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. Informasi dan Data diperoleh dari kuesioner yang dilakukan penyebaran angket yang menjadi sasaran yaitu responden Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Semarang Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner menggunakan bantuan google formulir (*g-form*) yang sasarannya diambil sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Semarang Selatan yang sudah terdata tanpa adanya unsur paksaan kemudian dengan sukarela membantu melakukan pengisian kuesioner tersebut. Perhitungan total responden dilakukan dengan menggunakan rumus *slovin* yang sudah ditentukan sebanyak 100 responden. Jumlah hasil pengembalian distribusi kuesioner sebagai berikut:

Tabel 4.1
Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang diterima	100	100%
Kuesioner yang tidak digunakan	0	0%
Kuesioner yang digunakan	100	100%

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Dari tabel distribusi sampel diatas diketahui jumlah kuesioner yang diterima sebanyak 100 responden, sesuai dengan rumus penentuan sampel maka kuesioner yang dianalisis sejumlah 100 responden. Penyebaran kuesioner pertama digunakan untuk menguji instrumen dengan 30 responden dan dilanjutkan penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden. Penelitian ini diketahui tiga variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sistem administrasi perpajakan modern. Sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini dilakukan dengan mengklasifikasikan responden berdasarkan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan jenis pekerjaan. Hasil distribusi sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	64	64%
Perempuan	36	36%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas klasifikasi responden pada sampel penelitian ini yaitu responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 64 responden atau sebesar 64% dari total responden, sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 36 responden atau sebesar 36% dari total responden. Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden yang menjadi sampel pada penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.3
Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
19 – 27 tahun	29	29%
28 – 36 tahun	29	29%
37 – 45 tahun	24	24%
46 – 54 tahun	13	13%
> 54 tahun	5	5%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas klasifikasi responden dengan usia 19 tahun sampai 27 tahun sebanyak 29 responden atau sebesar 29% dari total responden. Selain itu, responden dengan usia 28 tahun sampai 36 tahun sebanyak 29 responden atau sebesar 29% dari total responden. Berikutnya responden dengan usia 37 tahun sampai 45 tahun sebanyak 24 responden atau sebesar 24% dari total responden. Responden dengan usia 46 tahun sampai 54 tahun sebanyak 13 responden atau sebesar 13% dari total responden. Terakhir responden dengan usia diatas 54 tahun sebanyak 5 responden atau sebesar 5% dari total responden. Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden yang menjadi sampel pada penelitian ini didominasi oleh usia 19 – 27 tahun dan 28 – 36 tahun.

Tabel 4.4

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
SLTA / Sederajat	19	19%
D1 / D2 / D3	10	10%
D4 / S1	59	59%
S2 / S3	12	12%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas klasifikasi responden pada sampel penelitian ini yaitu responden dengan jenjang pendidikan SLTA atau sederajat sebanyak 19 responden atau sebesar 19% dari total responden. Sementara responden dengan jenjang pendidikan D1 sampai D3 sebanyak 10 responden atau sebesar 10% dari total responden. Selain itu, responden dengan jenjang pendidikan D4 atau S1 sebanyak 59 responden atau sebesar 59% dari total responden. Berikutnya responden dengan jenjang pendidikan S2 atau S3 sebanyak 12 responden atau sebesar 12% dari total responden. Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden yang menjadi sampel pada penelitian ini didominasi oleh jenjang pendidikan D4 / S1.

Tabel 4.5

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
PNS	11	11%
Karyawan Swasta	56	56%
Wirausaha	20	20%
Lainnya	13	13%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas klasifikasi responden pada sampel penelitian ini yaitu responden dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 11 responden atau sebesar 11% dari total responden. Sementara responden dengan pekerjaan karyawan swasta sebanyak 56 responden atau sebesar 56% dari total responden. Selain itu, responden dengan pekerjaan wirausaha sebanyak 20 responden atau sebesar 20% dari total responden, serta responden dengan pekerjaan lainnya sebanyak 13 responden atau sebesar 13% dari total responden. Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden yang menjadi sampel pada penelitian ini didominasi oleh jenis pekerjaan Karyawan Swasta.

4.2. TEKNIK ANALISIS DATA

4.2.1 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian yang dilihat berdasarkan atas nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, minimum, dan maksimum. Adapun variabel-variabel yang digunakan diantaranya Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berikut dibawah ini merupakan hasil dari analisis statistik deskriptif:

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	9	25	20.94	2.562
Kualitas Pelayanan	100	13	25	20.99	2.816
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	100	15	25	20.55	2.276
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	15	25	20.68	2.546
Valid N (listwise)	100				

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Valid	100	100	100	100
Missing	0	0	0	0
Mean	20,94	20,99	20,55	20,68
Std. Deviation	2,562	2,816	2,276	2,546
Minimum	9	13	15	15
Maximum	25	25	25	25

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas maka dapat dijelaskan pada bagian berikut ini:

a. Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan bahwa jumlah data penelitian sebanyak 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,94 dengan standar deviasi sebesar 2,562 serta nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 25.

b. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Kualitas Pelayanan menunjukkan bahwa jumlah data penelitian sebanyak 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,99 dengan standar deviasi sebesar 2,816 serta nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 25.

c. Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern menunjukkan bahwa jumlah data penelitian sebanyak 100 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 20,55 dengan standar deviasi sebesar 2,276 serta nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 25.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui analisis statistik deskriptif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa jumlah data penelitian sebanyak 100 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,68 dengan standar deviasi sebesar 2,546 serta nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 25.

4.2.2 UJI INSTRUMEN PENELITIAN

4.2.2.1 UJI VALIDITAS

Uji validitas ditujukan untuk menentukan valid atau tidaknya data setiap indikator pada kuesioner. Indikator dalam kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung $>$ r tabel dan kuesioner dikatakan tidak valid jika nilai r hitung $<$ r tabel. Untuk menentukan nilai r tabel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r \text{ tabel} = n - 2$$

$$r \text{ tabel} = 100 - 2$$

$$r \text{ tabel} = 98(0,196)$$

$$\text{Nilai signifikansi } 5\% = 0,05$$

Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Kesadaran Wajib Pajak
X1.1	Pearson Correlation	1	.517**	.477**	.519**	.289**	.726**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.004	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.517**	1	.368**	.496**	.403**	.694**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.477**	.368**	1	.585**	.393**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.519**	.496**	.585**	1	.680**	.875**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.289**	.403**	.393**	.680**	1	.740**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	.726**	.694**	.761**	.875**	.740**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Kualitas Pelayanan
X2.1	Pearson Correlation	1	.712**	.366**	.535**	.629**	.794**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.712**	1	.500**	.580**	.684**	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.366**	.500**	1	.564**	.521**	.730**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.535**	.580**	.564**	1	.772**	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.629**	.684**	.521**	.772**	1	.876**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kualitas Pelayanan	Pearson Correlation	.794**	.856**	.730**	.833**	.876**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Sistem Administrasi Perpajakan Modern
X3.1	Pearson Correlation	1	.548**	.505**	.133	-.024	.677**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.186	.809	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.548**	1	.531**	.190	.087	.727**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.059	.388	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.505**	.531**	1	.188	.178	.757**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.061	.077	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.133	.190	.188	1	.424**	.584**
	Sig. (2-tailed)	.186	.059	.061		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	-.024	.087	.178	.424**	1	.497**
	Sig. (2-tailed)	.809	.388	.077	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	Pearson Correlation	.677**	.727**	.757**	.584**	.497**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Y1	Pearson Correlation	1	.301**	.159	.214*	.270**	.531**
	Sig. (2-tailed)		.002	.114	.033	.007	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.301**	1	.655**	.441**	.493**	.810**
	Sig. (2-tailed)	.002		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.159	.655**	1	.466**	.496**	.782**
	Sig. (2-tailed)	.114	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.214*	.441**	.466**	1	.558**	.736**
	Sig. (2-tailed)	.033	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.270**	.493**	.496**	.558**	1	.759**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pearson Correlation	.531**	.810**	.782**	.736**	.759**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X₁)				
1	X ₁ 1	0,726	0,196	Valid
2	X ₁ 2	0,694	0,196	Valid

3	X ₁ 3	0,761	0,196	Valid
4	X ₁ 4	0,875	0,196	Valid
5	X ₁ 5	0,740	0,196	Valid
Kualitas Pelayanan (X ₂)				
1	X ₂ 1	0,794	0,196	Valid
2	X ₂ 2	0,856	0,196	Valid
3	X ₂ 3	0,730	0,196	Valid
4	X ₂ 4	0,833	0,196	Valid
5	X ₂ 5	0,876	0,196	Valid
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X ₃)				
1	X ₃ 1	0,677	0,196	Valid
2	X ₃ 2	0,727	0,196	Valid
3	X ₃ 3	0,757	0,196	Valid
4	X ₃ 4	0,584	0,196	Valid
5	X ₃ 5	0,497	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
1	Y 1	0,531	0,196	Valid
2	Y 2	0,810	0,196	Valid
3	Y 3	0,782	0,196	Valid
4	Y 4	0,736	0,196	Valid
5	Y 5	0,759	0,196	Valid

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Dilihat hasil pengujian validitas pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang dilakukan penyebaran menggunakan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁), Kualitas Pelayanan (X₂), Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X₃) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di KPP Pratama Semarang Selatan dinyatakan valid dimana r hitung $>$ r tabel (0,196).

4.2.2.2 UJI RELIABILITAS

Uji reliabilitas ditujukan untuk menunjukkan konsisten atau tidak dalam suatu kuesioner yang digunakan pada pengumpulan data dari masing-masing variabel penelitian. Pengukuran reliabilitas

diperlukan adanya pengujian statistik yang dilihat pada nilai *cronbach alpha* (α), dimana jika nilai *cronbach alpha* (α) $\geq 0,60$ sehingga variabel dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat diketahui pada tabel dibawah ini:

Reliability Statistics		Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.796	6	.810	6

Reliability Statistics		Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.758	6	.785	6

Tabel 4.8
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Cronbach Value</i>	Keterangan
X ₁	0,796	0,60	Reliabel
X ₂	0,810	0,60	Reliabel
X ₃	0,758	0,60	Reliabel
Y	0,785	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Dari tabel diatas kuesioner dinyatakan layak atau reliabel ditunjukkan dari besarnya nilai *Cronbach Alpha* melebihi nilai *Cronbach Value* 0,60.

1. Variabel X₁ menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu $0,796 > 0,60$.
2. Variabel X₂ menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu $0,810 > 0,60$.
3. Variabel X₃ menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu $0,758 > 0,60$.
4. Variabel X₄ menghasilkan besarnya nilai *Cronbach Alpha* yaitu $0,785 > 0,60$.

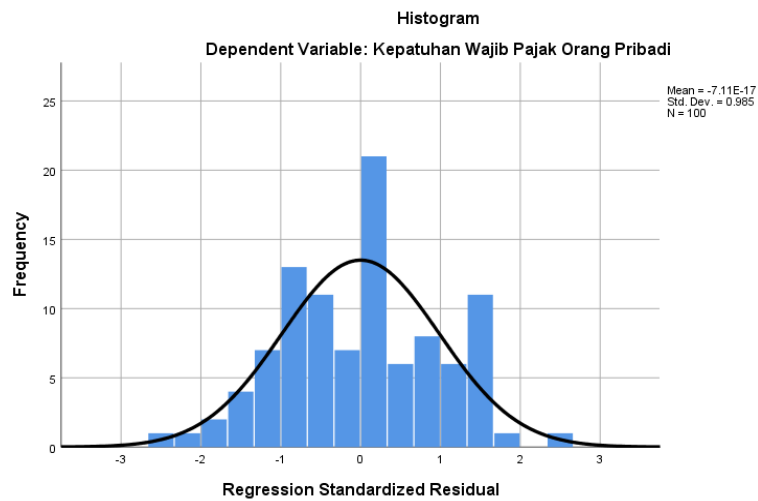
4.2.3 UJI ASUMSI KLASIK

Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

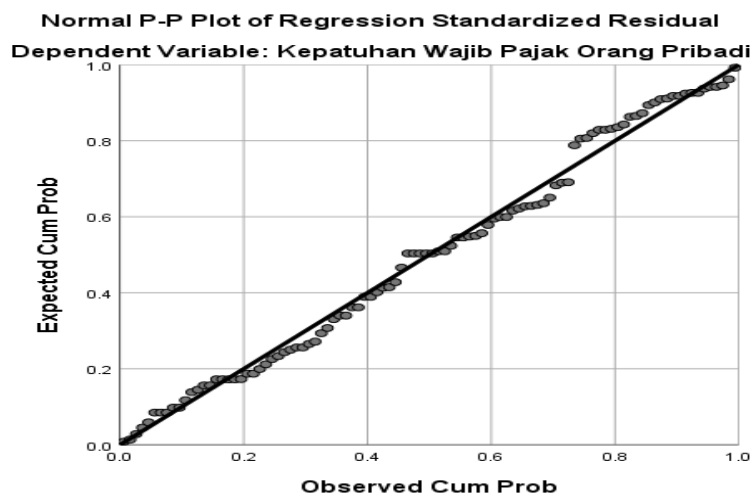
4.2.3.1 UJI NORMALITAS

Uji normalitas merupakan uji yang diperoleh dari data yang didapatkan berdistribusi normal atau tidak normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan histogram, p-plots dan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data dikategorikan normal. Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini:

Gambar 4.1 Hasil Uji Histogram



Gambar 4.2 Hasil Uji P-Plots



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.84596546
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.052
	Negative	-.069
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Tabel 4.9

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
N	100
Mean	0,0000000
Std. Deviation	1,84596546
Positive	0,052
Negative	-0,069
<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	0,069
Asymp. Sig (2-tailed)	0,200

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikan (*Asymp.Sig. (2-tailed)*) diketahui 0,200. Hal tersebut ditunjukkan bahwa data residual memiliki distribusi normal disebabkan telah melebihi batas dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,05, sehingga dapat dinyatakan jika penelitian ini melakukan penyebaran data yang berdistribusi normal.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berfungsi untuk mengetahui apakah ada variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen pada jenis regresi yang normal yaitu dimana tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui apakah terjadi gejala multikolinearitas perlu dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF. Kriteria pada uji multikolinearitas ditunjukkan apabila nilai *tolerance* yang dihasilkan $> 0,1$ dan nilai VIF yang dihasilkan < 10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel tersebut. Adapun hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.611	2.067		.780	.437		
	Kesadaran Wajib Pajak	.245	.081	.247	3.046	.003	.834	1.199
	Kualitas Pelayanan	.217	.074	.240	2.932	.004	.814	1.228
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	.456	.095	.407	4.815	.000	.765	1.307

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 4.10

Hasil Uji Multikolineritas

Model 1	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Wajib Pajak	0,834	1,199	Bebas Multikolinearitas
Kualitas Pelayanan	0,814	1.228	Bebas Multikolinearitas
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,765	1,307	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

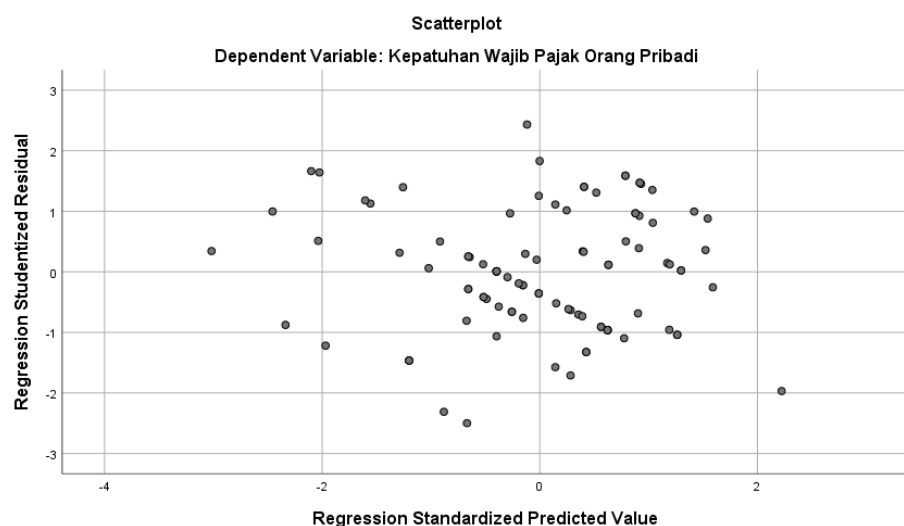
Dari tabel diatas dapat diketahui pengujian multikolinearitas jika semua variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* Kesadaran Wajib Pajak (X_1) sebesar 0,834, Kualitas Pelayanan (X_2) sebesar 0,814, dan

Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_3) sebesar 0,765. Dari uraian tersebut ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,1. Untuk nilai VIF Kesadaran Wajib Pajak (X_1) sebesar 1,199, Kualitas Pelayanan (X_2) sebesar 1,228, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_3) sebesar 1,307. Dari uraian tersebut masing-masing variabel bebas pada penelitian ini memiliki nilai VIF < 10. Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadinya perbedaan variabel residual suatu periode penelitian. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan scatterplot dan uji *white*. Pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas yaitu apabila nilai $c^2_{hitung} < c^2_{tabel}$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada data penelitian. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:

Gambar 4.3 Hasil Uji Scatterplot



Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.689 ^a	.474	.458	1.875

a. Predictors: (Constant), Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 4.11

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,689	0,474	0,458	1,875

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Menentukan c^2_{hitung} dan c^2_{tabel} dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$c^2_{hitung} = n \times r \text{ square}$$

$$c^2_{hitung} = 100 \times 0,474$$

$$c^2_{hitung} = 47,4$$

$$c^2_{tabel}$$

$$df = n - 1$$

$$df = 100 - 1$$

$$df = 99(123,225)$$

$$\text{Nilai signifikansi } 5\% = 0,05$$

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji *white* pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai c^2_{hitung} (47,4) < c^2_{tabel} (123,225). Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi atau terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.2.4 ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Pada penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linear berganda bisa dilihat pada tabel berikut:

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.611	2.067		.780	.437
	Kesadaran Wajib Pajak	.245	.081	.247	3.046	.003
	Kualitas Pelayanan	.217	.074	.240	2.932	.004
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	.456	.095	.407	4.815	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 4.12
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardizes Coefficienta		Standardize d Coefficient s Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	1,611	2,067		0,780	0,437
Kesadaran Wajib Pajak	0,245	0,081	0,247	3,046	0,003
Kualitas Pelayanan	0,217	0,074	0,240	2,932	0,004
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,456	0,095	0,407	4,815	0,000

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil pengujian regresi linear berganda dan dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 5,025 + 0,368X_1 + 0,268X_2 + 0,103X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

B₁ = Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak

B₂ = Koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan

B_3 = Koefisien regresi variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Kualitas Pelayanan

X_3 = Sistem Administrasi Perpajakan Modern

e = Standar error

Dari rumus diatas dapat diuraikan pada penjelasan dibawah ini:

- a. Koefisien (a) = nilai konstanta pada persamaan regresi linear berganda yang telah dihitung yaitu 1,611, yang diartikan pada masing-masing variabel independen (bebas) memiliki nilai nol (0), sehingga pada variabel dependen (terikat) memiliki nilai 1,611 atau dapat diartikan bahwa nilai konstanta bisa membuat angka variabel dependen menurun, yaitu sebesar -1,611.
- b. Koefisien X_1 (Kesadaran Wajib Pajak)
Dapat dilihat pada persamaan diatas bahwa nilai koefisien regresi X_1 bernilai positif sebesar 0,245. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar (satu) satuan yang disesuaikan dengan tingkat nominal kepatuhan wajib pajak sebesar 0,245.
- c. Koefisien X_2 (Kualitas Pelayanan)
Dapat dilihat pada persamaan diatas bahwa nilai koefisien regresi X_2 bernilai positif sebesar 0,217. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap kenaikan kualitas pelayanan sebesar (satu) satuan yang disesuaikan dengan tingkat nominal kepatuhan wajib pajak sebesar 0,217.
- d. Koefisien X_3 (Sistem Administrasi Perpajakan Modern)
Dapat dilihat pada persamaan diatas bahwa nilai koefisien regresi X_3 bernilai positif sebesar 0,456. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap kenaikan sistem administrasi perpajakan modern sebesar (satu) satuan yang disesuaikan dengan tingkat nominal kepatuhan wajib pajak sebesar 0,456.

4.2.5 UJI STATISTIK

4.2.5.1 UJI KOEFISIEN DETERMINASI (UJI R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa pengaruh variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sistem Administrasi Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Berikut hasil dalam uji koefisien determinasi:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.689 ^a	.474	.458	1.87459

a. Predictors: (Constant), Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

Tabel 4.13

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.689	0.474	0.458	1,87459

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,458. Hasil dari perhitungan menggunakan alat bantu SPSS 25 diketahui nilai dalam presentase menjadi 45,8% dari variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, sedangkan 54,2% (100% - 45,8%) variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini atau variabel lain.

4.2.5.2 UJI SIGNIFIKANSI PARSIAL (UJI t)

Uji signifikansi parsial atau biasa disebut uji t dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kriteria yang digunakan dalam uji t yaitu jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan df dan $alfa$ tertentu maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Penghitungan t_{tabel} dalam $df = n - k - 1$, dimana n

merupakan total keseluruhan data dan k merupakan total variabel independen, sehingga diperoleh perhitungan $df = 100 - 3 - 1 = 96$ dan selisih sig dengan 0,05 sehingga didapat t_{tabel} nilai sebanyak 1.660. Berikut hasil uji t pada penelitian ini:

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.879	1.868		5.823	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.468	.089	.471	5.285	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.624	1.700		6.839	.000
	Kualitas Pelayanan	.431	.080	.477	5.375	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.949	1.874		3.708	.000
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	.668	.091	.597	7.371	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 4.14
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	Unstandarizes Coefficienta		Standarized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Kesadaran Wajib Pajak	0,468	0,089	0,471	5,285	0,000
Kualitas Pelayanan	0,431	0,080	0,477	3,708	0,000
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,668	0,091	0,597	7,371	0,000

Sumber: Data primer diolah peneliti SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas diperoleh penjabaran sebagai berikut:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai $t_{hitung} (5,285) > t_{tabel} (1,660)$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dapat diasumsikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai nilai $t_{hitung} (3,708) > t_{tabel} (1,660)$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima, dapat diasumsikan bahwa Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki nilai nilai $t_{hitung} (7,371) > t_{tabel} (1,660)$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima, dapat diasumsikan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.3. PEMBAHASAN ANALISIS HASIL DATA

Pada pembahasan analisis hasil data peneliti mencoba menjelaskan tingkat pengaruh dari variabel kesadaran wajib pajak (X_1), kualitas pelayanan (X_2) dan sistem administrasi perpajakan modern (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dengan penyebaran kuesioner yang melibatkan 100 responden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Semarang Selatan)”. Dengan mengacu pada data yang terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan alat bantu SPSS 26 dapat memberikan hasil sebagai berikut:

4.3.1 PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis awal pada pengaruh variabel (X_1) terhadap variabel (Y) yaitu kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan *t_{hitung}* sebesar 5,285 atau tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Tingkat kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan terhadap kepatuhan perpajakan pada KPP Pratama Semarang Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Yunika dan Supadmi (2019) dan Utari dkk (2020) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketika wajib pajak telah memiliki pemahaman dan pelaksanaan yang baik mengenai pentingnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat dan menurunkan niat untuk bertindak tidak patuh. Secara tidak langsung wajib pajak sudah berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Sebaliknya, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Khoeriyah dan Titik (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan Teori Atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan faktor dari dalam yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mematuhi serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sudah semestinya wajib pajak sebagai warga negara menyadari bahwa wajib pajak harus melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Wajib pajak akan bersungguh-sungguh dan berkeinginan untuk mematuhi hak dan kewajiban dalam perpajakan, yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terkait fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Hal tersebut akan mencerminkan wajib pajak untuk menunjukkan kesadaran wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Oleh sebab itu, patuh tidaknya wajib pajak

dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk berkeinginan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

4.3.2 PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis awal pada pengaruh variabel (X_2) terhadap variabel (Y) yaitu kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar 3,708 atau tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Tingkat kualitas pelayanan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan terhadap kepatuhan perpajakan pada KPP Pratama Semarang Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Feni dan Khalisah (2021) dan Henny dan Prayogi (2021) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk berkomunikasi dengan wajib pajak memang tidak mudah, karena terdapat banyak wajib pajak di Indonesia khususnya di daerah Semarang. Untuk berkomunikasi, melayani dan memberikan arahan kepada wajib pajak tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Sifat wajib pajak dari seseorang berbeda-beda, ada yang mengerti, memahami dan sudah biasa berhubungan dengan hal perpajakan. Tetapi ada juga yang baru terjun ke dunia perpajakan, bahkan ada yang tidak mengetahui tentang perpajakan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan wajib pajak masing-masing. Namun, dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, wajib pajak akan lebih senang, terbuka dan akan konsultasi jika terdapat masalah dalam hal perpajakan.

Berdasarkan Teori Atribusi, kualitas pelayanan merupakan faktor relasional (dalam dan luar) yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka

pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹ Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak tentu berpengaruh besar terhadap wajib pajak ketika membutuhkan pelayanan pajak. Kualitas pelayanan juga dinilai sebagai perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh wajib pajak dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyedia layanan.⁵⁰ Kesigapan untuk membantu, keramahan dalam pelayanan serta kepekaan terhadap situasi dan kondisi yang diberikan oleh pegawai pajak terhadap wajib pajak akan membuat rasa puas dan nyaman ketika mendapatkan bantuan pengurusan kewajiban pajak. Hal tersebut tentu memberi motivasi dan kesadaran dari wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan juga keberhasilan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

4.3.3 PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis awal pada pengaruh variabel (X_3) terhadap variabel (Y) yaitu sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan *t*-hitung sebesar 7,371 atau tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Tingkat kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan terhadap kepatuhan perpajakan pada KPP Pratama Semarang Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wahyuni, dkk (2021) dan Romasi Lumban Gaol (2021) yang menjelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini tidak sesuai dengan Rika (2019) dan Anita (2021)

⁴⁹ Rita J. D. Atarwaman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi*, 6.1 (2020), 39–51 (hal. 21).

⁵⁰ Yunika Antari, Ni Luh Putu, dan Ni Luh Supadmi. 2019. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP." *E-Jurnal Akuntansi* 26(28), 221-250 (hal.227). doi: 10.24843/eja.2019.v26.i01.p09.

yang mengatakan sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Teori Atribusi, sistem administrasi perpajakan modern merupakan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan yang baik serta memadai akan membuat wajib pajak semakin yakin, termotivasi dan taat serta patuh akan hak dan kewajiban perpajakan. Hal tersebut didukung dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan meningkatkan pelayanan dan kemudahan wajib pajak dalam mengakses kebutuhan perpajakan melalui teknologi berbasis online. Dengan adanya sistem seperti *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT*, dan *e-filing* akan mempermudah wajib pajak dalam membuat npwp, membayar pajak serta melaporkannya. Selain itu, pelayanan dan pengawasan yang baik, proses administrasi yang efektif dan efisien dan profesionalitas pegawai pajak diharapkan mampu memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di Kota Semarang, maka dapat disimpulkan:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 5,285 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat Kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Variabel Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,708 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat Kualitas Pelayanan maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 7,371 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat Sistem Administrasi Perpajakan Modern maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

5.2. KETERBATASAN PENELITIAN

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya responden pada penelitian ini disebabkan sampel penelitian yang digunakan hanya sebesar 100 responden dan belum

meliputi seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan

2. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel, diantaranya Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, sehingga kesimpulan penelitian menjadi terbatas pada variabel tersebut.
3. Objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu tempat, yaitu pada KPP Pratama Semarang Selatan sehingga penelitian menjadi terbatas pada objek tersebut.

5.3. SARAN-SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan peneliti dalam menjelaskan hubungan antar variabel, peneliti memberikan beberapa saran untuk menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi penelitian selanjutnya diantaranya:

1. Bagi penelitian berikutnya dapat mengembangkan indikator lain atau variabel yang belum ada pada penelitian ini, karena peneliti hanya membahas tiga variabel dan terbatas pada indikator tertentu dari variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, sehingga kesimpulan penelitian menjadi terbatas pada indikator tersebut.
2. Bagi penelitian berikutnya dapat memperluas objek yang digunakan, karena peneliti hanya mengambil satu objek tempat. Diharapkan dengan memperluas objek dapat memaksimalkan penelitian berikutnya dan dapat mengambil sampel responden lebih banyak dibandingkan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ari, Nur Ghailina, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Ekobis Dewantara*, 1 (2018), 64–76
- Atarwaman, Rita J. D., "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi*, 6.1 (2020), 39–51
- Jotopurnomo, Cindy, dan Yenni Mangoting, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya," *Tax & Accounting Review*, 1 (2013)
- K. A. Dharma, G. P. E. dan Suardana, "Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak," *E-Jurnal Akuntansi*, 6.1 (2014), 340–53.
- Kemenkeu.go.id, "Perbandingan Komponen dan Struktur Pajak OECD dan Government Finance Statistic Manual dan Pengaruhnya atas Pendefinisian Tax Ratio di Indonesia," <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perbandingan-komponen-dan-struktur-pajak-oecd-dan-government-finance-statistic-manual-dan-pengaruhnya-atas-pendefinisiantax-ratio-di-indonesia>, diakses Kamis, 14 September 2023
- Khasanah, Septiyani Nur dan Amanita Novi Y., 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013', *Jurnal Profita*, 4.8 (2016), 1-13
- Khoeriyah, Nur, dan Titik Mildawati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 2017
- Kumala Jaya, Dessy Natalia, "Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DKI Jakarta," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan*

Bisnis, 3.2 (2019), 255

Lubis, Henny Zurika, dan Prayogi Irawan Sukoco, “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *SiNTESa*, 1 (2021), 583–89

Mardiasmo, “Perpajakan”. Penerbit: Andi (Anggota IKAPI), 2010

Nugroho, Setio Spto, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” *Kementerian Sekretariat Negara*, 2009, 1–11

Pradhitya, Idzhar Syah, dan Kurnia, “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Serang Barat Tahun 2020,” *e-Proceeding of Management*, 9.5 (2022), 3201–9

Primastiwi, Anita dan Ratih Dwi C, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 6.2(2021). 46-54

Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Bandung: *Rekayasa Sains*, ed. oleh Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*, Cetakan Pe (Bandung: *Rekayasa Sains Bandung*, 2017)

Romadhon, Fitri, dan Erlina Diamastuti, “Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory,” *Jurnal Ilmiah Esai*, 14.1 (2020), 17–35

Saifudin dan Jumiati Novitasari, ‘Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Semarang Barat Dan KPP Pratama Semarang Gayamsari)’, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 16.2 (2020), 97–105

Sasmita, Rika Indah. “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Mitra Manajemen Edisi Oktober*, 3.10 (2019). 946-1037.

Situmorang, Frenky, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di

- Kota Medan,” *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP)*, 7.1 (2020), 47–61
- Sukma, Fillanty Indah, dan Anissa Yuniar Larasati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cimahi),” *Riset Akuntansi dan Perbankan*, 15.2 (2021), 517–35
- The World Bank, <https://data.worldbank.org/country>, diakses 14 September 202
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” 2000 (2007).
- Vivi Kumalasari Subroto, “Memahami Arti Tax Ratio”, <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Memahami-Arti-Tax-Ratio>, diakses pada Kamis, 01 Juni 2023
- Waru, Oktaviana Agustania, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Ruteng)”. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1.6(2018), 193-202
- Widiarti, Feni, dan Khalisah Viana, “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Model Penerimaan Teknologi (TAM) Sebagai Pemoderasi,” *Akuntansi Manajerial*, 6.2 (2021), 1–21
- Widnyani, Ida Ayu Dewi, dan Ketut Alit Suardana, “Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16.3 (2016), 2176–2203
- Wijaya, M. Ardi, Tina Miniawati Barusman, dan Defrizal, “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung,” *Jurnal Visionist*, 9.1 (2020), 6–15
- Yunika Antari, Ni Luh Putu, dan Ni Luh Supadmi, “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP,” *E-Jurnal Akuntansi*, 26.28 (2019), 221

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Lampiran : Kuesioner Penelitian
Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/I Responden

Di Tempat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) UIN Walisongo Semarang, saya:

Nama Lengkap : Shandy Pratama
NIM / Jurusan : 1905046099 / Akuntansi Syariah
Semester / Fakultas : VIII / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Selatan)”**. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/ibu untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Penelitian ini mengambil sampel pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan. Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Shandy Pratama

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Mohon angket diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.
2. Beri tanda centang (*v*) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Bapak/Ibu/Saudara/I :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
3. Usia : < 19 tahun 28 – 36 tahun 46 – 54 tahun
 19 – 27 tahun 37 – 45 tahun > 54 tahun
4. Jenjang Pendidikan : SLTA / Sederajat
 D1 / D2 / D3 D4
 S1 S2 / S3
 Lainnya
5. Jenis Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Karyawan Swasta
 Wirausaha Lainnya

PETUNJUK PENGISIAN

Perhatikan baik-baik pernyataan dibawah ini dan pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat, dengan cara memberi tanda centang (*v*) pada setiap butir pertanyaan dengan petunjuk sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk pembangunan negara					
2	Pembayaran pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
3	Saya memahami kewajiban sebagai wajib pajak untuk membayar pajak					
4	Saya dengan senang hati untuk membayar pajak					
5	Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk membayar pajak					

2. Kualitas Pelayanan (X2)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya merasa petugas pajak cakap dalam melaksanakan tugas					
2	Saya merasa petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak					
3	Saya merasa petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak					
4	Saya merasa petugas pajak memberikan pelayanan yang baik.					
5	Saya merasa petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak.					

3. Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	<i>e-Registration</i> memudahkan saya dalam melakukan pendaftaran NPWP					
2	<i>e-Banking</i> memudahkan saya dalam melakukan pembayaran pajak					
3	Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filing</i> sangat efektif					
4	Direktorat Jenderal Pajak rutin melakukan pemeriksaan pajak					
5	Petugas pajak dapat memberikan pelayanan secara professional					

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mendaftarkan NPWP atas keinginan sendiri					
2	Saya telah mengisi surat pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu					
3	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak					
4	Saya mampu melakukan perhitungan dan pembayaran pajak dengan benar					
5	Banyaknya tempat pembayaran dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak					

Lampiran 2 Tabulasi Data

a. Variabel X1 (Kesadaran Wajib Pajak)

Responden	Kesadaran Wajib Pajak					Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	5	4	4	4	4	21
2	4	4	4	4	4	20
3	4	5	5	5	5	24
4	4	5	5	4	5	23
5	4	4	5	5	4	22
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	5	4	4	21
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	5	4	4	21
10	4	4	4	4	4	20
11	5	5	5	5	5	25
12	5	5	5	5	5	25
13	4	4	5	5	5	23
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	5	4	4	21
17	4	5	4	5	5	23
18	4	4	4	5	5	22
19	4	4	4	3	3	18
20	4	4	4	3	3	18
21	4	4	4	5	5	22
22	4	4	5	5	5	23
23	5	4	4	4	4	21
24	4	4	4	4	4	20
25	5	5	5	5	5	25
26	4	4	4	3	3	18
27	5	4	5	4	5	23

28	4	4	4	4	4	20
29	5	5	4	4	4	22
30	5	4	5	4	5	23
31	5	5	5	5	5	25
32	5	4	5	4	4	22
33	4	5	5	4	4	22
34	4	5	3	5	5	22
35	4	4	5	5	5	23
36	3	4	5	4	3	19
37	5	4	3	4	3	19
38	5	4	4	5	5	23
39	5	4	5	4	3	21
40	4	4	5	3	4	20
41	4	5	5	5	5	24
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	5	4	4	5	5	23
46	1	3	1	1	3	9
47	5	5	4	4	4	22
48	5	5	5	5	5	25
49	4	4	5	5	4	22
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	5	4	3	20
52	3	4	2	3	3	15
53	4	4	4	3	4	19
54	5	4	4	5	4	22
55	4	5	4	5	4	22
56	4	3	4	4	4	19
57	4	5	4	4	3	20
58	4	5	4	5	4	22

59	4	4	5	4	4	21
60	5	4	5	4	3	21
61	3	4	5	4	5	21
62	4	5	3	4	5	21
63	3	3	3	3	3	15
64	5	5	4	4	4	22
65	4	4	4	4	4	20
66	4	4	4	4	4	20
67	5	5	4	4	5	23
68	5	5	4	4	4	22
69	4	4	4	4	3	19
70	4	4	4	4	4	20
71	3	4	4	3	3	17
72	4	4	3	3	3	17
73	4	4	4	4	4	20
74	2	3	2	2	3	12
75	5	5	5	5	5	25
76	4	4	4	3	3	18
77	5	5	4	3	3	20
78	4	4	4	5	5	22
79	4	5	5	5	5	24
80	5	5	5	5	3	23
81	4	4	4	4	4	20
82	4	4	4	4	3	19
83	5	4	4	4	4	21
84	4	4	4	4	4	20
85	4	5	5	5	5	24
86	4	5	5	4	5	23
87	4	4	5	5	4	22
88	4	4	4	4	4	20
89	4	4	5	4	4	21

90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	5	4	4	21
92	4	4	4	4	4	20
93	5	5	5	5	5	25
94	5	5	5	5	5	25
95	4	4	5	5	5	23
96	4	4	4	4	4	20
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	5	4	4	21
99	5	5	5	4	3	22
100	4	4	4	4	4	20

b. Variabel X2 (Kualitas Pelayanan)

Responden	Kualitas Pelayanan					Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	5	5	5	5	5	25
3	5	4	5	5	5	24
4	5	4	5	5	5	24
5	4	4	5	4	4	21
6	5	5	4	5	5	24
7	5	5	5	5	5	25
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20
11	5	5	3	4	4	21
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	5	4	4	21
14	4	5	5	5	5	24
15	5	5	4	4	4	22
16	5	5	5	5	5	25
17	5	5	4	5	5	24

18	4	4	4	4	4	20
19	3	3	3	3	3	15
20	4	3	4	4	4	19
21	4	5	5	5	5	24
22	4	5	5	5	5	24
23	3	3	3	4	4	17
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	5	5	4	22
26	4	4	4	4	4	20
27	4	5	5	5	5	24
28	4	4	4	4	4	20
29	5	5	5	5	5	25
30	4	5	4	5	5	23
31	5	5	5	5	5	25
32	4	5	5	4	5	23
33	4	5	4	4	5	22
34	4	5	5	4	5	23
35	4	4	4	5	5	22
36	5	4	3	4	5	21
37	5	4	4	5	4	22
38	3	4	5	4	4	20
39	5	4	3	4	4	20
40	4	4	5	4	4	21
41	4	4	4	5	5	22
42	5	5	5	5	5	25
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	5	5	5	4	4	23
46	4	4	4	4	4	20
47	4	4	4	4	4	20
48	5	5	5	4	4	23

49	4	4	4	5	5	22
50	5	5	5	5	5	25
51	4	4	3	4	3	18
52	2	3	4	5	4	18
53	5	4	5	4	5	23
54	4	4	4	3	4	19
55	5	4	5	4	4	22
56	5	4	3	4	5	21
57	3	4	5	4	3	19
58	4	3	4	5	4	20
59	5	5	4	4	4	22
60	4	5	4	4	5	22
61	4	4	5	4	5	22
62	4	3	5	4	5	21
63	3	3	3	3	3	15
64	3	2	3	3	2	13
65	4	4	5	4	4	21
66	4	4	4	4	4	20
67	4	4	4	4	4	20
68	3	3	3	3	3	15
69	3	3	3	3	3	15
70	3	3	3	4	4	17
71	4	4	2	3	4	17
72	3	3	4	4	3	17
73	5	5	4	5	5	24
74	4	4	4	4	4	20
75	3	3	4	3	3	16
76	3	3	3	3	3	15
77	3	2	3	3	3	14
78	3	3	3	4	4	17
79	4	5	5	4	4	22

80	5	5	5	5	5	25
81	4	4	4	4	4	20
82	4	4	5	4	4	21
83	4	4	4	4	4	20
84	5	5	5	5	5	25
85	5	4	5	5	5	24
86	5	4	5	5	5	24
87	4	4	5	4	4	21
88	5	5	4	5	5	24
89	5	5	5	5	5	25
90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	4	4	4	20
92	4	4	4	4	4	20
93	5	5	3	4	4	21
94	4	4	4	4	4	20
95	4	4	5	4	4	21
96	4	5	5	5	5	24
97	5	5	4	4	4	22
98	5	5	5	5	5	25
99	4	4	4	4	4	20
100	4	4	4	4	4	20

c. Variabel X3 (Sistem Administrasi Perpajakan Modern)

Responden	Sistem Administrasi Perpajakan Modern					Total
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	5	5	5	4	5	24
3	3	5	4	4	5	21
4	5	4	4	5	5	23
5	5	5	5	4	4	23
6	2	2	2	4	5	15

7	5	4	4	3	5	21
8	4	4	4	3	4	19
9	4	4	4	3	4	19
10	4	4	4	3	4	19
11	3	4	4	4	5	20
12	4	5	4	4	4	21
13	4	4	4	4	5	21
14	4	5	5	4	5	23
15	5	5	5	4	4	23
16	4	4	5	4	4	21
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	4	3	19
20	3	3	3	3	3	15
21	4	5	5	5	5	24
22	4	4	3	3	4	18
23	5	5	5	4	4	23
24	4	4	4	4	4	20
25	4	5	5	5	5	24
26	5	5	5	4	3	22
27	4	4	4	5	5	22
28	3	4	4	3	4	18
29	5	5	5	4	5	24
30	5	4	5	4	4	22
31	5	5	5	5	5	25
32	4	5	5	4	5	23
33	5	4	5	5	5	24
34	4	4	5	4	5	22
35	4	4	4	5	5	22
36	4	3	5	4	5	21
37	3	4	5	4	5	21

38	3	5	4	4	5	21
39	5	4	4	5	4	22
40	4	5	3	4	4	20
41	5	4	5	4	4	22
42	5	5	5	5	5	25
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	4	4	20
46	4	3	4	3	4	18
47	4	4	4	4	5	21
48	4	4	4	5	5	22
49	4	4	5	5	5	23
50	4	4	4	3	3	18
51	4	5	4	3	4	20
52	3	4	5	3	4	19
53	4	4	5	5	4	22
54	3	3	4	4	3	17
55	4	5	4	4	4	21
56	4	5	3	5	4	21
57	4	4	3	5	4	20
58	3	4	5	4	5	21
59	4	4	5	3	4	20
60	4	4	3	5	4	20
61	4	4	5	4	3	20
62	4	4	3	5	4	20
63	3	3	3	3	3	15
64	4	4	2	3	3	16
65	4	5	4	4	5	22
66	4	4	4	4	4	20
67	5	4	4	3	5	21
68	4	4	4	3	3	18

69	5	5	5	4	4	23
70	4	4	4	3	3	18
71	3	4	4	3	3	17
72	5	4	5	4	4	22
73	2	2	2	4	5	15
74	4	3	4	3	4	18
75	4	4	4	4	4	20
76	4	4	3	2	3	16
77	5	5	4	4	3	21
78	4	4	4	4	4	20
79	5	5	5	4	4	23
80	3	4	5	5	4	21
81	4	4	4	4	4	20
82	4	4	4	3	4	19
83	4	4	4	4	4	20
84	5	5	5	4	5	24
85	3	5	4	4	5	21
86	5	4	4	5	5	23
87	5	5	5	4	4	23
88	2	2	2	4	5	15
89	5	4	4	3	5	21
90	4	4	4	3	4	19
91	4	4	4	3	4	19
92	4	4	4	3	4	19
93	3	4	4	4	5	20
94	4	5	4	4	4	21
95	4	4	4	4	5	21
96	4	5	5	4	5	23
97	5	5	5	4	4	23
98	4	4	5	4	4	21
99	5	5	5	3	4	22

100	4	4	4	4	4	20
-----	---	---	---	---	---	----

d. Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi					Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	3	4	4	4	4	19
2	3	5	4	5	4	21
3	5	5	5	5	5	25
4	4	5	5	4	5	23
5	5	5	5	5	5	25
6	4	2	2	4	4	16
7	5	3	4	4	4	20
8	4	4	4	4	4	20
9	3	4	4	4	4	19
10	3	4	4	4	4	19
11	3	3	4	4	5	19
12	4	4	4	4	4	20
13	4	5	5	5	5	24
14	4	5	5	5	5	24
15	5	5	4	4	4	22
16	4	4	4	4	4	20
17	4	5	5	5	5	24
18	5	5	5	5	5	25
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	5	5	5	25
22	4	5	5	5	5	24
23	5	4	4	3	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	5	5	4	4	5	23
26	4	4	4	4	4	20

27	4	5	5	5	5	24
28	4	4	4	4	4	20
29	5	5	5	5	5	25
30	4	5	5	5	5	24
31	5	4	4	4	4	21
32	5	5	5	5	5	25
33	4	4	5	5	5	23
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	5	5	5	23
36	4	3	4	5	3	19
37	4	5	3	5	4	21
38	4	4	4	3	5	20
39	5	3	4	4	4	20
40	5	4	4	5	4	22
41	5	5	5	5	5	25
42	4	5	5	5	5	24
43	4	4	4	4	4	20
44	4	3	4	3	4	18
45	3	4	5	5	5	22
46	3	4	3	4	4	18
47	4	4	5	5	5	23
48	4	4	5	5	5	23
49	4	4	5	5	5	23
50	4	4	4	4	4	20
51	5	4	3	3	5	20
52	5	4	3	4	4	20
53	4	4	5	4	3	20
54	4	4	5	3	3	19
55	5	4	3	4	4	20
56	4	5	4	3	4	20
57	4	4	3	4	5	20

58	4	3	3	4	4	18
59	5	4	4	3	4	20
60	5	5	4	4	5	23
61	4	4	5	3	4	20
62	5	4	3	4	5	21
63	4	3	3	3	3	16
64	3	4	4	4	5	20
65	4	4	5	5	5	23
66	4	4	4	4	4	20
67	3	3	4	4	4	18
68	4	5	5	3	4	21
69	4	4	4	4	3	19
70	4	4	3	4	4	19
71	2	3	4	2	4	15
72	3	3	3	3	3	15
73	4	2	2	4	4	16
74	3	4	3	4	4	18
75	4	4	4	4	4	20
76	3	3	3	3	3	15
77	3	3	3	3	3	15
78	4	4	4	3	4	19
79	5	4	4	4	4	21
80	4	5	5	3	4	21
81	4	4	4	4	4	20
82	4	4	3	3	4	18
83	3	4	4	4	4	19
84	3	5	4	5	4	21
85	5	5	5	5	5	25
86	4	5	5	4	5	23
87	5	5	5	5	5	25
88	4	2	2	4	4	16

89	5	3	4	4	4	20
90	4	4	4	4	4	20
91	3	4	4	4	4	19
92	3	4	4	4	4	19
93	3	3	4	4	5	19
94	4	4	4	4	4	20
95	4	5	5	5	5	24
96	4	5	5	5	5	24
97	5	5	4	4	4	22
98	4	4	4	4	4	20
99	5	4	4	4	5	22
100	4	4	4	4	4	20

Lampiran 3 Hasil Output SPSS Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	9	25	20.94	2.562
Kualitas Pelayanan	100	13	25	20.99	2.816
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	100	15	25	20.55	2.276
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	15	25	20.68	2.546
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 4 Hasil Output SPSS Uji Validitas

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

		Correlations					Kesadaran Wajib Pajak
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
X1.1	Pearson Correlation	1	.517**	.477**	.519**	.289**	.726**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.004	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.517**	1	.368**	.496**	.403**	.694**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.477**	.368**	1	.585**	.393**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.519**	.496**	.585**	1	.680**	.875**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.289**	.403**	.393**	.680**	1	.740**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	.726**	.694**	.761**	.875**	.740**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Variabel Kualitas Pelayanan (X2)

		Correlations					Kualitas Pelayanan
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
X2.1	Pearson Correlation	1	.712**	.366**	.535**	.629**	.794**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.712**	1	.500**	.580**	.684**	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.366**	.500**	1	.564**	.521**	.730**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.535**	.580**	.564**	1	.772**	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.629**	.684**	.521**	.772**	1	.876**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kualitas Pelayanan	Pearson Correlation	.794**	.856**	.730**	.833**	.876**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)

		Correlations					Sistem Administrasi Perpajakan Modern
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
X3.1	Pearson Correlation	1	.548**	.505**	.133	-.024	.677**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.186	.809	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.548**	1	.531**	.190	.087	.727**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.059	.388	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.505**	.531**	1	.188	.178	.757**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.061	.077	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.133	.190	.188	1	.424**	.584**
	Sig. (2-tailed)	.186	.059	.061		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	-.024	.087	.178	.424**	1	.497**
	Sig. (2-tailed)	.809	.388	.077	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	Pearson Correlation	.677**	.727**	.757**	.584**	.497**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

		Correlations					Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
Y1	Pearson Correlation	1	.301**	.159	.214*	.270**	.531**
	Sig. (2-tailed)		.002	.114	.033	.007	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.301**	1	.655**	.441**	.493**	.810**
	Sig. (2-tailed)	.002		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.159	.655**	1	.466**	.496**	.782**
	Sig. (2-tailed)	.114	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.214*	.441**	.466**	1	.558**	.736**
	Sig. (2-tailed)	.033	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.270**	.493**	.496**	.558**	1	.759**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pearson Correlation	.531**	.810**	.782**	.736**	.759**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 5 Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.796	6

b. Kualitas Pelayanan (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.810	6

c. Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.758	6

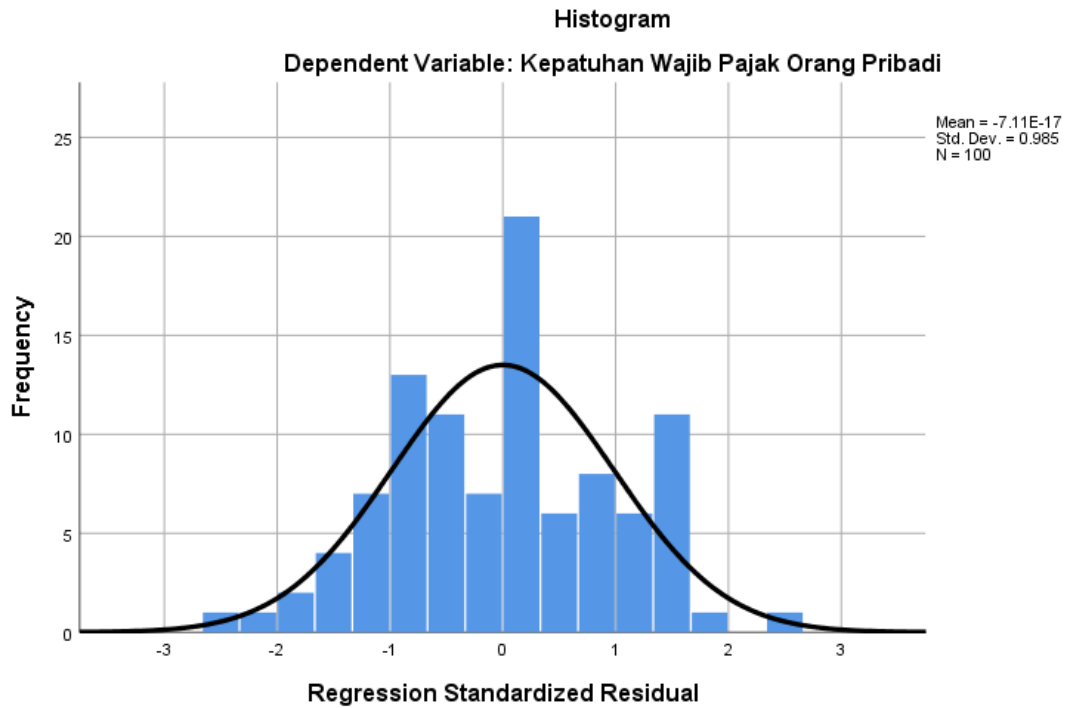
d. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Reliability Statistics

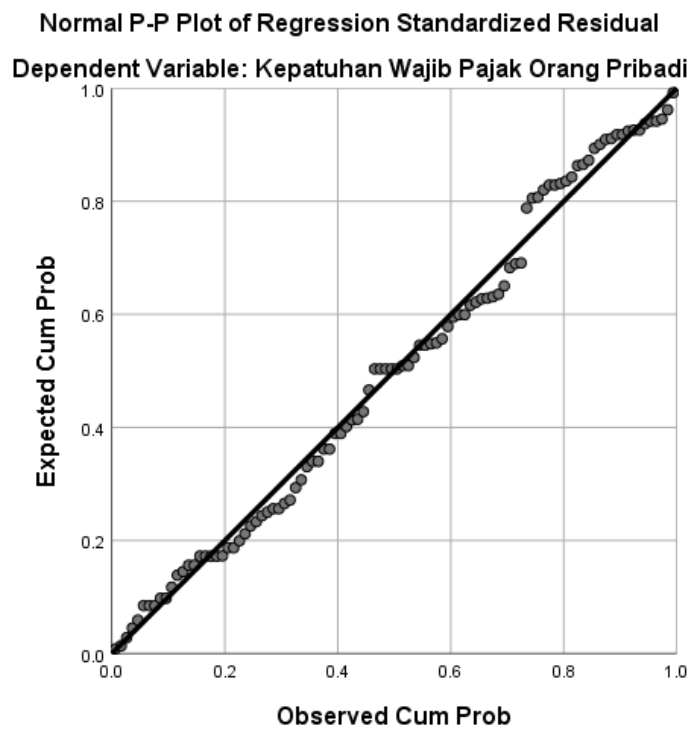
Cronbach's Alpha	N of Items
.785	6

Lampiran 6 Hasil Output SPSS Uji Normalitas

a. Hasil Output SPSS Uji Histogram



b. Hasil Output SPSS Uji P-Plots



c. Hasil Output SPSS Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.84596546
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.052
	Negative	-.069
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 7 Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas

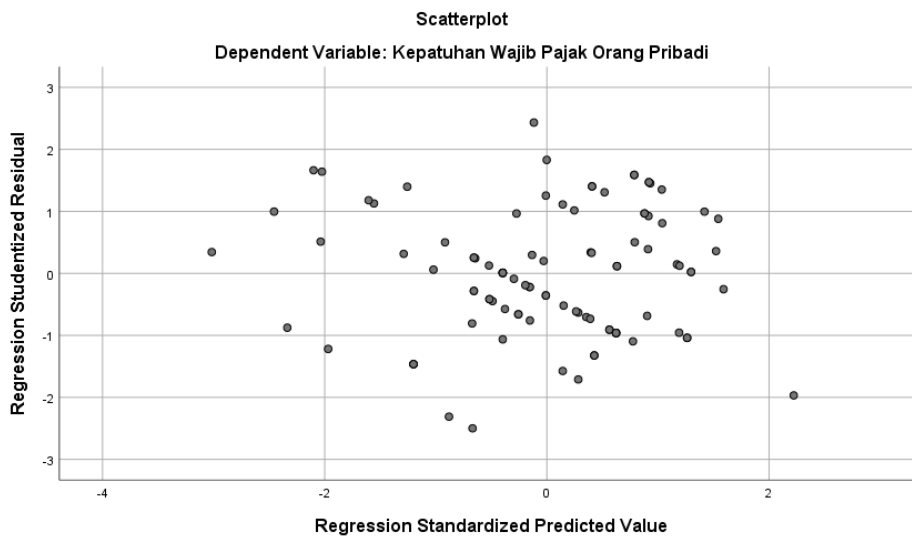
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.611	2.067		.780	.437		
	Kesadaran Wajib Pajak	.245	.081	.247	3.046	.003	.834	1.199
	Kualitas Pelayanan	.217	.074	.240	2.932	.004	.814	1.228
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	.456	.095	.407	4.815	.000	.765	1.307

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lampiran 8 Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas

a. Hasil Output SPSS Uji *Scatterplot*



b. Hasil Output SPSS Uji *White*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.689 ^a	.474	.458	1.875

a. Predictors: (Constant), Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lampiran 9 Hasil Output SPSS Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.611	2.067		.780	.437
	Kesadaran Wajib Pajak	.245	.081	.247	3.046	.003
	Kualitas Pelayanan	.217	.074	.240	2.932	.004
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	.456	.095	.407	4.815	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lampiran 10 Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.689 ^a	.474	.458	1.87459

a. Predictors: (Constant), Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

Lampiran 11 Hasil Output SPSS Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.879	1.868		5.823	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.468	.089	.471	5.285	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Variabel Kualitas Pelayanan (X2)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.624	1.700		6.839	.000
	Kualitas Pelayanan	.431	.080	.477	5.375	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

c. Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X3)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.949	1.874		3.708	.000
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	.668	.091	.597	7.371	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lampiran 12 Surat Izin e-Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I

GEDUNG KEUANGAN NEGARA SEMARANG II, JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50173
TELEPON (024) 3544065; 3544055; FAKSIMILE (024) 3540416; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-59/WPJ.10/WPJ.105/2023 19 Mei 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Set
Hal : Persetujuan Ijin Riset an Shandy Pratama di KPP Pratama Semarang Selatan

Yth. Shandy Pratama

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan surat pengantar izin riset nomor 1052/Un.10.5/D1/PG.00.00/03/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan informasi:

NIM	:	1905046099
Kategori Riset	:	Gelar-S1
Jurusan/Fakultas/Perguruan Tinggi	:	Akuntansi Syariah / Ekonomi dan Bisnis Islam / Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Riset	:	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Izin Yang Diminta	:	Data/Kuesioner/Wawancara

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesiapan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara **diberikan izin** untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Semarang Selatan, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

1. Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 17 Mei 2023 s/d 17 November 2023;
2. Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3. Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
4. Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
5. Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah I
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Mahartono

Tembusan:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Shandy Pratama
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Agustus 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kebagusan Besar III No.37 RT.006/RW.006,
Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta
Selatan
Nomor *Handphone* : 08998029605
Email : shandyp555@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Asih Tahun 2006 – 2007
2. SD N Pondok Labu 12 Pagi Tahun 2007 – 2013
3. SMP N 85 Jakarta Tahun 2013 – 2016
4. SMK N 20 Jakarta Tahun 2016 – 2019
5. UIN Walisongo Semarang Tahun 2019 – 2023

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Tax Center FEBI UIN Walisongo (Ketua Umum) Tahun 2022 – 2023
2. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (Anggota Divisi Jurnalistik) Tahun 2022 – 2023
3. Forum Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan UIN Walisongo Semarang (Anggota Divisi Kemenlu) Tahun 2022 – 2023

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Juni 2023


Shandy Pratama